

MODUL EKONOMI MAKRO



Dr. Reza, S.Pd., M.Pd
Riyo Riyadi, S.Pd., M.Pd
Ilham Abu, S.Pd., M.Pd



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

MODUL

EKONOMI MAKRO

TIM PENYUSUN

Dr. Reza, S.Pd., M.Pd.

Riyo Riyadi, S.Pd., M.Pd.

Ilham Abu, S.Pd., M.Pd.



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya penulisan modul ekonomi Makro, ini dapat diselesaikan. Tujuan utama modul ini ditulis adalah agar mudah dipahami pembaca, terutama pembaca pemula. Namun demikian, menulis buku supaya “terbaca” bukanlah tugas mudah. Apalagi, dalam khasanah ilmu ekonomi makro banyak ahli yang memiliki teori dan pendekatan berbeda.

Modul ini disusun dalam tujuh kegiatan pembelajaran yaitu I. Pengertian Dan Permasalahan Ekonomi, II. Pengertian Dan Permasalahan Ekonomi Makro, III. Kerangka Analisa Ekonomi Makro, IV Beberapa Kelemahan Sistem Mekanisme Pasar Dan Bentuk-Bentuk Campur Tangan Pemerintah, V. Teori Makro Klasik, VI Ekonomi Baru Dari J.M. Keynes, VII. Perhitungan Pendapatan Nasional. Modul ini merupakan embrio awal dari buku ajar Ekonomi Makro yang akan disusun dengan lebih lengkap.

Modul ini diawali dengan sebuah pengantar yang secara persuasif akan mendorong pembaca untuk tertarik membaca modul ini. Di akhir, buku ini dilengkapi dengan soal-soal jawaban pendek, yang akan memberikan evaluasi tentang pemahaman modul ini.

Terkahir, karena modul ini sifatnya adalah pengantar, beberapa bab tidak dijelaskan secara detail dan hanya digambarkan secara singkat. Karenanya penulis mohon kritik dan masukan untuk menyempurnakan penulisan ini.

November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
KEGIATAN PEMBELAJARAN I. PEGERTIAN DAN PERMASALAHAN EKONOMI ...	1
A. Pengertian Ilmu Ekonomi	1
B. Permasalahan Perekonomian Ditinjau Dari Sudut Penggunaan Faktor Produksi	3
C. Permasalahan Ekonomi Ditinjau Dari	
D. Kesejahteraan Masyarakat.....	5
E. Permasalahan Ekonomi Ditinjau Dari Sudut Moneter	6
F. Soal Latihan	7
KEGIATAN BELAJAR II. PENGERTIAN DAN PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO	8
A. Pengertian Ilmu Ekonomi Makro	8
B. Hubungan Antara Variabel Ekonomi Makro	10
C. Permasalahan Ekonomi Makro	12
D. Kebijakan Ekonomi Makro.....	14
E. Soal Latihan	19
KEGIATAN BELAJAR III. KERANGKA ANALISA EKONOMI MAKRO	21
A. Empat Pasar Makro	21
B. Lima Pelaku Ekonomi	25
C. Soal Latihan	27
KEGIATAN BELAJAR IV BEBERAPA KELEMAHAN SISTEM MEKANISME PASAR DAN BENTUK-BENTUK CAMPUR TANGAN PEMERINTAH	29
A. Campur Tangan Pemerintah Dalam Perekonomian.....	29
B. Beberapa Keburukan Sistem Mekanisme Pasar	30
C. Bentuk-Bentuk Campur Tangan Pemerintah	31
D. Soal Latihan	38
KEGIATAN BELAJAR V. TEORI MAKRO KLASIK	40
A. Dasar Filsafat Kaum Klasik	40

B. Beberapa Komentar Mengenai Teori Klasik.....	47
C. Teori Klasik Dan Realita Sejarah	49
D. Soal Latihan	51
KEGIATAN BELAJAR VI. EKONOMI BARU DARI J.M. KEYNES	51
A. Sifat Umum Dari Teori Keynes.....	51
B. Peranan Uang	54
C. Masalah Hoarding	55
D. Hubungan Antara Tingkat Bunga Dengan Uang	56
E. Peranan Investasi	57
F. Ketidakpastian Masa Yang Akan Datang.....	57
G. Azas Permintaan Efektif.....	58
H. Sistem J.M. Keynes Tentang Politik Ekonomi	59
I. Peranan Tabungan (Saving)	60
J. Komentar Terhadap Teori Ekonomi Keynes	61
K. Kritik-Kritik Terhadap Teori Keynes.....	62
L. Arti Dari Teori Ekonomi Keynes	63
M. Soal Latihan	63
KEGIATAN BELAJAR VII. PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL	65
A. Pengukuran Pendapatan Nasional.....	65
B. Jenis-Jenis Perhitungan Pendapatan Nasional.....	68
C. Metode Pengeluaran.....	77
D. Transaksi-Transaksi Yang Tidak Termasuk Dalam Perhitungan Pendapatan Nasional.....	180
E. Soal Latihan	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

KEGIATAN BELAJAR I

PENGERTIAN DAN PERMASALAHAN EKONOMI

Bab ini membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi dan permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam ekonomi dan bagaimana cara pemecahannya. Konsep dasar ilmu ekonomi disebabkan oleh kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas sedangkan barang dan jasa yang dihasilkan terbatas, dari awal konsep inilah kita bisa mengamati bagaimana tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, hal apa saja yang dilakukan dalam upaya mendapatkan atau menghasilkan barang dan jasa.

Sedangkan permasalahan ekonomi yang diidentifikasi dalam buku ajar ini ada beberapa hal yaitu ditinjau dari sudut penggunaan faktor produksi, ditinjau dari kesejahteraan masyarakat, dan ditinjau dari sudut moneter. Ditinjau dari penggunaan faktor produksi hal yang dilihat adalah bagaimana menentukan jenis barang yang akan diproduksi, bagaimana teknik/caranya dan bagaimana mempertinggi efisiensi faktor produksi. Ditinjau dari kesejahteraan masyarakat hal yang dilihat adalah masalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk dan distribusi pendapatan masyarakat. Sedangkan ditinjau dari sudut moneter hal yang dilihat adalah permasalahan Inflasi dan tingkat bunga.

Dari penjelasan Bab di atas setelah mempelajari bahan yang diberikan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian ilmu ekonomi
2. Menjelaskan dan menganalisa permasalahan ekonomi ditinjau dari sudut penggunaan faktor produksi
3. Menjelaskan dan menganalisa permasalahan ekonomi ditinjau dari sudut kesejahteraan masyarakat
4. Menjelaskan dan menganalisa permasalahan ekonomi ditinjau dari sudut moneter

A. PENGERTIAN ILMU EKONOMI

Manusia dalam aktifitas kehidupan sehari-hari banyak menghadapi masalah ekonomi, masalah ini timbul akibat tidak seimbangnya jumlah kebutuhan manusia dan jumlah produksi barang dan jasa yang sanggup disediakan produsen. Kadang jumlah kebutuhan manusia terlalu kecil dibanding jumlah produksi yang disediakan produsen, atau

EKONOMI MAKRO

sebaliknya jumlah kebutuhan manusia terlalu besar dibandingkan jumlah produksi barang dan jasa yang sanggup disediakan produsen.

Manusia dengan segala keinginan dan kebutuhannya, akan berusaha secara maksimal untuk dapat memuaskan kebutuhan tersebut dengan seluruh aktifitasnya. Manusia juga akan berusaha untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu sebelumnya atau masa yang akan datang dibandingkan masa yang lalu. Alat pemuas (diciptakan dan diproses oleh faktor produksi) untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan yang dapat disediakan oleh perusahaan (kapasitas terpasang secara nasional) sangat terbatas jumlahnya atau adanya kelangkaan faktor-faktor produksi yang dapat menciptakan alat pemuas kebutuhan manusia tersebut.

Keterbatasan atau kelangkaan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan alat pemuas kebutuhan inilah yang menciptakan masalah ekonomi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Berdasarkan keterangan di atas dapat diberikan pengertian ekonomi: Ilmu Ekonomi adalah suatu cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dan terbatas jumlahnya seefektif dan seefisien mungkin.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana keterbatasan dan kelangkaan faktor-faktor produksi, terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi itu sendiri:

1. Tanah

Tanah sebagai faktor produksi dalam pengertian sehari-hari adalah sebagai tempat untuk bercocok tanam (tanah pertanian dan perkebunan) juga segala kekayaan yang terkandung didalamnya maupun di atasnya, seperti barang-barang tambang (minyak mentah, batubara, timah, emas) dan hasil hutan (kayu, rotan dan lainnya).

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja bukan saja berdasarkan jumlah penduduk yang dapat digunakan dalam proses produksi, juga harus diperhitungkan pengetahuan atau *skill* (keahlian) yang dimilikinya. Jadi, tenaga kerja yang dimaksudkan sudah termasuk kemampuan seseorang menggunakan tenaga serta pikirannya. Melihat kesanggupan berpikir dan keahlian tenaga kerja dapat digolongkan:

- a. Golongan pertama, adalah tenaga kerja terdidik, tingkat keterampilannya sudah tinggi, contohnya: pilot, dokter, manajer dan lainnya.
- b. Golongan kedua, adalah tenaga kerja semi terdidik atau terlatih, tenaga kerja ini telah mendapat sedikit pendidikan dan latihan bidang tertentu, contoh: tukang las, operator mesin.
- c. Golongan ketiga, adalah tenaga kerja yang tidak terlatih, golongan ini tidak mempunyai keahlian atau pendidikan sehingga tenaga kerja ini hanya mengandalkan tenaga jasmani saja, contohnya: petani, pelayan toko, buruh tani.

3. Modal

Modal adalah seluruh peralatan yang dibutuhkan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Jenis peralatan yang dimaksud adalah mesin untuk industri atau mesin untuk membajak sawah. Uang juga termasuk dalam pengertian modal karena uang inilah menyebabkan mesin-mesin tersebut bisa menjalankan fungsinya, seperti pembelian bahan bakar bahan baku untuk proses produksi barang.

4. Keahlian Keusahawanan (Wiraswasta)

Setiap orang belum tentu mempunyai kesanggupan untuk menjalankan sebuah perusahaan sehingga kemampuan seseorang dalam mengelola perusahaan secara efisien dan menguntungkan merupakan salah satu faktor produksi. Dahulu keahlian keusahawanan ini dimasukkan sebagai tenaga kerja, tetapi makin disadari keahlian ini merupakan hal yang istimewa yang dimiliki orang tertentu.

Keahlian ini fungsinya adalah mengorganisir dan menggabungkan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan kebutuhan manusia secara efisien dan menguntungkan.

B. PERMASALAHAN PEREKONOMIAN DITINJAU DARI SUDUT PENGGUNAAN FAKTOR PRODUKSI

Permasalahan dalam sebuah perekonomian dapat terjadi akibat faktor-faktor produksi yang ada dalam perekonomian sehingga akan timbul masalah karena penggunaan faktor produksi tadi. Adapun permasalahannya adalah:

1. Menentukan Jenis Barang Yang Akan Diproduksi

Terbatasnya faktor-faktor produksi yang tersedia dalam sebuah perekonomian (masyarakat atau negara), tentu harus dilakukan pilihan suka atau tidak suka untuk penggunaan faktor produksi tersebut. Penentuan barang dan jasa yang akan diproduksi

lebih banyak ditentukan oleh kebutuhan yang ada dalam masyarakat atau sistem perekonomian karena kebutuhan masyarakat inilah yang paling menentukan atau mempengaruhi pilihan yang akan dilaksanakan. Pilihan yang harus dilakukan hal ini akan menyebabkan kebutuhan-kebutuhan yang ada atau lainnya tidak akan dapat dipenuhi dari faktor produksi yang dimiliki tersebut. Dengan kata lain, dalam memenuhi kebutuhan untuk satu jenis produk oleh masyarakat, harus mengorbankan kebutuhan-kebutuhan lainnya (*opportunity cost*).

2. Menentukan Teknik Produksi

Untuk menghasilkan produk kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa dapat ditempuh dengan berbagai macam cara, mulai dari penggunaan teknologi yang paling sederhana sampai dengan teknologi yang canggih. Penentuan teknologi produksi yang akan dipakai untuk menghasilkan produk masyarakat akan mempengaruhi tingkat harga produk. Menentukan cara dan teknik produksi, harus dipilih cara yang terbaik bagi masyarakat atau negara itu. Terbaik dapat berarti efisien dilihat dari segi teknik produksi, optimal dari segi ekonomi atau paling efektif dilihat dari segi sosial.

3. Mempertinggi Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi

Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi adalah:

- a. Membuat perencanaan pembangunan ekonomi yang terpadu dan membuat / menciptakan sektor prioritas yang telah direncanakan sampai batas tertentu sehingga tidak terjadi pemusatan infestasi pada sektor industri yang menguntungkan saja.
- b. Menciptakan perencanaan pembangunan ekonomi yang padat karya atau padat pemakaian tenaga manusia, sehingga terjadi perbaikan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Sehingga akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian
- c. Berusaha meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat bersaing di pasar Internasional. Dengan sendirinya kapasitas faktor-faktor produksi tidak akan pernah di bawah kapasitas normal.

C. PERMASALAHAN EKONOMI DITINJAU DARI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Peningkatan aktifitas ekonomi atau segala sesuatu yang menyangkut aktifitas ekonomi akan mempunyai dampak positif ataupun negatif. Dampak negatif inilah yang menciptakan permasalahan dalam perekonomian yang mempunyai hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan ekonomi ditinjau dari kesejahteraan masyarakat adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Banyak cara yang dapat dilakukan suatu negara guna memajukan pertumbuhan ekonominya antara lain dengan cara menawarkan kemudahan kepada investor asing agar mau menanamkan modal di negara tersebut, mempromosikan tenaga kerja dengan upah yang murah, menciptakan persaingan yang sehat antara pengusaha untuk meningkatkan efisiensi, dan menyiapkan prasarana fisik secara baik.

Kebijaksanaan yang dijalankan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah dengan melakukan industrialisasi dalam berbagai sektor sehingga pertumbuhan ekonomi akan dapat dipacu setinggi mungkin, dan akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan suatu perekonomian yang tidak terlalu tinggi tidak bisa diharapkan mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, karena perekonomian dapat dikatakan berkembang bila pertumbuhan ekonomi lebih besar dari jumlah pertumbuhan penduduk.

Setiap negara berkembang berusaha menekan angka kelahiran sekecil mungkin, karena angka kelahiran yang tinggi akan menciptakan beban pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Berbagai cara telah dilakukan untuk menekan angka kelahiran seperti Program Keluarga Berencana dan menetapkan batas usia perkawinan. Hal ini masih menjadi beban bagi negara berkembang karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

3. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang terjadi dalam masyarakat tidak selalu sama dengan industri yang ideal. Masyarakat sebagai penerima tentu mengharapkan distribusi pendapatan berbagai golongan diciptakan lebih merata. Ketimpangan yang terjadi pada distribusi pendapatan diantara berbagai golongan pada sebuah sistem perekonomian

khususnya pada negara berkembang, lebih banyak disebabkan kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah sebagai pengelola yang dominan dalam perekonomian.

Agar distribusi pendapatan dapat merata kebijaksanaan yang diambil pemerintah selalu dikaitkan dengan golongan masyarakat banyak. Yaitu masyarakat yang bergerak di sektor pertanian ini disebabkan negara berkembang sebagian besar masyarakatnya bergerak di sektor pertanian.

D. PERMASALAHAN EKONOMI DITINJAU DARI SUDUT MONETER

Untuk menciptakan pertumbuhan perekonomian suatu negara banyak faktor yang harus dikendalikan sehingga yang terjadi bukan pertumbuhan ekonomi yang diperoleh justru penurunan aktifitas perekonomian. Maka faktor-faktor yang perlu dikendalikan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi dari sudut moneter yaitu

1. Inflasi

Salah satu tindakan yang diambil dalam mengatasi inflasi adalah tingkat uang yang beredar. Bilamana tingkat uang yang beredar lebih tinggi dibandingkan pendapatan nasional suatu negara pada periode tertentu, menyebabkan terjadinya inflasi di atas tingkat wajar. Kondisi inflasi di atas wajar akan menciptakan perekonomian yang tinggi, keadaan ini bila ditinjau dari pertumbuhan ekonomi memang sangat menguntungkan tetapi beban yang ditanggung masyarakat juga akan meningkat seiring naiknya tingkat inflasi.

Harga-harga kebutuhan masyarakat meningkat sehingga nilai riil uang yang ditangan masyarakat akan ikut menurun. Kebijakan pemerintah menghadapi situasi perekonomian dalam inflasi di luar kendali adalah melalui bank sentral pemerintah yang akan mengeluarkan berbagai tindakan guna menarik uang yang beredar dalam masyarakat.

2. Tingkat Bunga

Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi suatu negara diperlukan tingkat investasi yang tinggi pula. Tingkat investasi sangat dipengaruhi tingkat bunga dan kestabilan perekonomian. Tingkat bunga yang tinggi akan menekan tingkat investasi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan tingkat bunga yang rendah untuk merangsang investor. Hal ini diharapkan akan menembus stagnasi pertumbuhan ekonomi. Disamping itu kestabilan perekonomian dan politik suatu negara

sangat menentukan tingkat investasi karena tanpa kestabilan politik para investor akan takut menanggung resiko yang terjadi.

E. SOAL LATIHAN

1. Buatlah Definisi Ilmu Ekonomi menurut pendapat anda
2. Jelaskan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi
3. Bagaimana meningkatkan kualitas produk sehingga dapat bersaing dipasaran Internasional
4. Bagaimana melakukan pemerataan distribusi pendapatan
5. Mengapa permasalahan ekonomi ditinjau dari sudut moneter sangat dipengaruhi oleh Inflasi dan tingkat bunga
6. Mengapa keinginan dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas menjadi penyebab timbulnya ilmu ekonomi
7. menurut anda langkah-langkah apa saja yang perlu diambil pada saat menentukan jenis barang yang akan diproduksi
8. Mengapa tingkat bunga yang tinggi sangat mempengaruhi perekonomian suatu Negara
9. Mengapa inflasi tidak menjadi masalah apabila tingkat pendapatan penduduk sudah tinggi
10. Benarkah investasi sangat dipengaruhi oleh kestabilan politik didalam negeri

DAFTAR REFERENSI

- Boediono, Ekonomi Makro, BPFE, Yogyakarta, 1983
Djamil Suyuthi, Pengantar Ekonomi Makro, P2LPTK, Jakarta, 1990
Mulya Nasution, Teori Ekonomi Makro, Djambatan, Jakarta, 1997
Soelistyo, Teori Ekonomi Makro I, Karunika, Jakarta, 1998

KEGIATAN BELAJAR II

PENGERTIAN DAN PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO

Dalam bab II ini dibahas pengertian dan permasalahan ekonomi makro serta kebijakan-kebijakan yang diambil dalam ekonomi makro. Dalam ekonomi makro hal yang dipelajari adalah lingkup perekonomian secara nasional, yang nantinya berkaitan dengan Negara-negara lain yaitu masalah ekspor dan impor serta berhubungan dengan kapasitas produksi secara nasional, bagaimana daya beli masyarakat, kecenderungan atau tindakan apa yang dilakukan masyarakat dan hal-hal lainnya yang bersifat makro.

Untuk permasalahan ekonomi makro dibagi menjadi 2 (dua) yaitu permasalahan jangka pendek dan jangka panjang. Adapun permasalahan jangka pendek meliputi masalah inflasi, pengangguran dan ketimpangan neraca pembayaran, sedangkan permasalahan jangka panjang adalah permasalahan pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi makro baik jangka pendek maupun jangka panjang diperlukan adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah secara tepat, kebijakan ini meliputi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan yang ada dapat dilakukan secara satu persatu ataupun secara gabungan. Dari bahasan-bahasan dalam bab ini kita perlu membuat suatu tujuan Instruksional khusus (TIK), sehingga setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian ekonomi makro
2. Menjelaskan dan menganalisa permasalahan ekonomi makro baik jangka pendek maupun jangka panjang
3. Menjelaskan dan menganalisa kebijakan-kebijakan ekonomi makro

A. PENGERTIAN ILMU EKONOMI MAKRO

Ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang membahas tentang perilaku ekonomi secara keseluruhan mulai dari masalah perkembangan dan resesi ekonomi total output barang dan jasa termasuk total pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan tingkat pengangguran, neraca pembayaran dan nilai tukar mata uang. Ia juga sangat berkepentingan dengan masalah peningkatan output dan lapangan kerja sepanjang periode waktu tertentu yakni pertumbuhan ekonomi serta terhadap masalah fluktuasi jangka pendek yang membentuk lingkaran ekonomi.

EKONOMI MAKRO

Ilmu ekonomi makro memusatkan perhatian terhadap tingkah laku dan kebijaksanaan yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi nilai mata uang dan neraca perdagangan. Faktor-faktor penyebab perubahan dalam penggajian dan tingkat harga, kebijaksanaan fiscal dan moneter, cadangan devisa, anggaran pemerintah pusat tingkat suku bunga dan hutang nasional. Singkatnya ilmu ekonomi makro membahas berbagai masalah pokok prekonomian masa kini dalam artian yang sesungguhnya.

Ilmu ekonomi tidak hanya menarik karena ia membahas masalah penting, tetapi sangat menantang dan merangsang, karena ia dapat mengurangi kadar kompleksitas yang terkandung dalam prekonomian ketinggian yang lebih mudah untuk dikendalikan. Esensi ini terletak pada interaksi barang, tenaga kerja dan pasar modal dari perekonomian dan pada interaksi antar negara yang saling menggalang hubungan perdagangan timbal balik.

Dalam membahas esensi yang dimaksud, kita tidak harus bersusah payah memusatkan perhatian terlalu rinci pada tingkah laku unit-unit ekonomi individual seperti rumah tanggadan perusahaan, proses penentuan harga pada pasar-pasar tertentu, ini lebih tepat untuk dijelaskan dalam ilmu ekonomi Mikro. Di dalam perekonomian makro kita berhadapan dengan masalah pasar barang-barang secara keseluruhan. Memperlakukan pasar yang dimaksud sesuai dengan jenis barang yang diperdagangkan disana seperti pasar untuk pertanian dan jasa, pelayanan kesehatan sebagai pasar tunggal.

Sejalan dengan itu kita juga berhadapan dengan pasar tenaga kerja secara keseluruhan, sembari membedakan pasar pekerja pendatang dan pasar tenaga kerja medis misalnya. Dengan mengabaikan pasar-pasar individual, kita juga dapat memusatkan diri secara lebih khusus pada pasar-pasar yang lebih mendasar.

Sekalipun terdapat perbedaan ekonomi makro dengan ekonomi mikro, namun keduanya tidak mengandung pertentangan penting apapun juga. Sebaliknya ekonomi dalam bentuk yang menyeluruh jelas merupakan total penjumlahan dari bagian pasar yang ada. Perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro hanya terletak pada masalah penyajiannya saja. Dalam mempelajari proses penentuan harga pada suatu industri, para pakar ekonomi mikro beranggapan bahwa harga pada industri yang lain adalah tertentu. Dalam ekonomi makro dimana kita juga mempelajari tingkat harga adalah lebih bagus

EKONOMI MAKRO

kalau kita mengabaikan perubahan harga relatif barang antar industri yang berbeda, didalam ekonomi makro lebih bermanfaat kalau kita mengasumsikan bahwa pendapatan total dari semua konsumen adalah tertentu dan mempelajari para konsumen membagi pengeluaran mereka. Dan dalam ekonomi makro, total pendapatan yang dibelanjakan adalah variabel utama yang dipelajari.

B. HUBUNGAN ANTARA VARIABEL EKONOMI MAKRO

Sebelum kita bicarakan mengenai variable dalam ekonomi makro, terlebih dahulu kita uraikan tentang suatu model dalam ekonomi makro. Secara umum model merupakan suatu perwujudan dari suatu abstraksi berbagai aspek realita atau dunia nyata yang dibuat satu atau beberapa tujuan tertentu, dalam analisis ekonomi merupakan pencerminan hubungan antar variable. Model berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan gejala-gejala atau perilaku-perilaku yang ada maupun yang belum diketahui. Perwujudan model sebagai konstruksi teoritis apabila dinyatakan secara kuantitatif akan berbentuk suatu hubungan antar perilaku yang sangat kompleks dan rumit, sehingga pembuatan suatu model sebagai pencerminan hubungan antara perilaku yang ada tidak akan mampu menggambarkan seperti keadaan yang sebenarnya. Sebagai contoh, dalam membuat model tentang penentuan tingkat konsumsi. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi suatu masyarakat, diantaranya; pendapatan, kekayaan, jumlah anggota keluarga, tingkat bunga lingkungan, selera dan sebagainya. Karena banyak faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, untuk memudahkan analisa digunakan asumsi bahwa konsumsi hanya dipengaruhi oleh pendapatan dan faktor lainnya dianggap tetap (*ceteris paribus*).

Bila disimpulkan bahwa sebuah model akan terdiri atas:

1. Seperangkat definisi yang secara jelas merumuskan variable-variabel yang akan digunakan.
2. Sejumlah asumsi yang digambarkan berbagai kondisi dimana sebuah teori berlaku, dan
3. Satu atau lebih hipotesis tentang hubungan antara variable-variabel, yaitu tentang derajat keeratan dan arah hubungan antar variabel.

Variabel adalah besaran (konsep teori) yang dapat memuat kemungkinan nilai-nilai yang berbeda, sebagai contoh pendapatan rumah tangga adalah konsep teori ekonomi

yang besarnya akan berbeda-beda antara satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lain, dan dari titik waktu ke waktu yang lainnya. Variabel adalah elemen dasar dari sebuah model dan karenanya perlu didefinisikan secara jelas dan tepat. Bentuk dan formal dari hubungan antara variabel ini kemudian akan membentuk suatu fungsi.

Pengelompokkan variabel-variabel dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu variabel eksogen (*exogenous variable*) dan variabel endogen (*endogenous variable*). Variabel eksogen yaitu variabel-variabel yang nilainya ditentukan di luar model atau dengan kata lain nilai variabel ini sudah tertentu. Sementara variabel endogen merupakan variabel yang nilainya baru dapat ditentukan bila nilai dari variabel-variabel eksogen dan bentuk formal hubungan antar variabel diketahui atau bisa diartikan suatu variabel yang nilainya ditentukan atau tergantung dengan variabel lainnya.

Variabel dapat juga dibedakan menjadi variabel stock dan variabel flow. Variabel stock adalah konsep atau besaran ekonomi yang tidak memiliki dimensi waktu, sedangkan variabel flow merupakan konsep atau besaran ekonomi yang memiliki dimensi waktu. Persediaan barang atau material perusahaan merupakan variabel stock, sedangkan jumlah penjualan perusahaan merupakan variabel flow.

Dalam sebuah model terdapat hubungan variabel flow yang didefinisikan dan deduksi dari teori yang sesuai. Secara umum hubungan antar variabel dalam ilmu ekonomi terdiri dari 4 tipe, yaitu:

1. Hubungan perilaku, merupakan gambaran hubungan satu variabel atau beberapa variabel.
Contoh: Bentuk formal hubungan antar jumlah konsumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah pendapatan (Y) maka dapat ditulis $C = a + cY$
2. Hubungan identitas, yang merupakan hubungan definisional yang tepat sama antara satu variabel dengan satu atau beberapa variabel lain.
Contoh: $GDP = C + I + G + (X - M)$
3. Hubungan teknologi, menggambarkan hubungan antara variabel yang disebabkan oleh sifat fisik dari variabel tersebut.
Contoh: Reaksi biaya total karena merupakan jumlah output yang diproduksi.
4. Hubungan kelembagaan, yaitu hubungan yang terjadi karena pengaruh tindakan suatu lembaga.

C. PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO

Seandainya kita dapat memilih, maka kita akan suatu dunia dimana setiap orang yang sanggup dan ingin bekerja dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Kita menginginkan tingkat harga yang stabil dan taraf hidup yang semakin meningkat, kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dengan pembagian pendapatan yang adil dan merata.

Keadaan ideal seperti diatas kiranya masih jauh dari kenyataan, keadaan yang kita hadapi adalah masih terdapatnya tingkat pengangguran dan inflasi yang tinggi, taraf hidup yang masih rendah dialami oleh sebagian besar penduduk dunia, serta pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Keadaan seperti ini adalah permasalahan utama ekonomi makro.

Ada tiga permasalahan ekonomi makro jangka pendek yang harus diatasi setiap saat. Ketiga masalah tersebut adalah: (1) Inflasi; (2) Pengangguran; (3) Ketimpangan dalam neraca pembayaran. Masalah-masalah jangka pendek tersebut harus diatasi dengan kebijakan yang tepat. Karena kalau ketiganya tidak diatasi dengan cepat, bisa berkembang menjadi permasalahan yang serius dan dapat menghambat usaha-usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan yang merupakan permasalahan ekonomi jangka panjang.

1. Masalah Inflasi

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami hampir semua negara, Pembicaraan tentang inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga, kenaikan harga mungkin hanya terjadi pada beberapa barang tertentu saja, dapat pula hanya berlangsung sementara (temporer) dan sporadic, tetapi dapat pula kenaikan harga itu bersifat umum dan terus menerus. Kalau kenaikan harga hanya bersifat sementara dan sporadic, maka kenaikan harga itu belum berarti inflasi. Maka dapat diambil kesimpulan pengertian inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus menerus.

Orang sering khawatir tentang inflasi dan menganggap inflasi dapat menurunkan standar hidup mereka. Kekhawatiran ini muncul dengan alasan bahwa inflasi menaikkan biaya hidup sehingga standar hidup jadi menurun, hal ini tidak selalu benar. Dalam masa-masa inflasi harga-harga output dan input, upah sewa dan bunga cenderung meningkat

bersama-sama. Tingkat hidup ditentukan oleh hubungan antara pendapatan yang diperoleh dengan harga-harga yang harus dibayar.

Bila tingkat upah naik melebihi kenaikan tingkat harga, tingkat hidup meningkat, sebaliknya bila kenaikan tingkat upah lebih rendah dari kenaikan tingkat harga, tingkat hidup menurun. Hubungan antara perubahan pendapatan atau tingkat upah dengan tingkat harga menentukan arah perubahan kesejahteraan ekonomi.

Walaupun inflasi tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, namun inflasi merupakan masalah karena tiga alasan yaitu:

- a. Inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat.
- b. Inflasi dapat mengakibatkan penurunan efisiensi ekonomi.
- c. Inflasi dapat mengakibatkan perubahan output dan kesempatan kerja.

2. Masalah Pengangguran

Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan sedang mencari kerja menurut referensi waktu tertentu. Mereka terpaksa menganggur karena belum atau tidak mendapat lapangan kerja. Berbeda dengan orang-orang yang dengan sengaja tidak bekerja, misalnya karena sedang istirahat, belajar atau sebagai ibu rumah tangga. Mereka ini tidak tergolong sebagai penganggur.

Untuk mengetahui tingkat pengangguran, terlebih dahulu perlu diketahui jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja yang ada dalam perekonomian. Tidak semua penduduk tergolong angkatan kerja, misalnya penduduk yang masih terlalu muda atau sudah terlalu tua. Apabila mereka tidak bekerja dan tidak mencoba mencari kerja maka mereka tidak termasuk golongan angkatan kerja. Sehingga dapat disimpulkan tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang menganggur dengan angkatan kerja secara keseluruhan.

Berdasarkan besarnya tingkat pengangguran, dapat diketahui apakah perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (full employment) atau tidak. Secara teoritis perekonomian dianggap mencapai kesempatan kerja penuh apabila tenaga kerja tersedia seluruhnya dipergunakan. Dalam praktek yang dimaksud dengan tingkat kesempatan kerja penuh mengandung arti yang sedikit berbeda. Untuk menentukan apakah perekonomian telah mencapai full employment atau belum, yang menjadi patokan adalah bukanlah penggunaan tenaga kerja sebesar 100%, tetapi penggunaan tenaga kerja yang lebih

rendah dari itu. Pada umumnya tingkat kesempatan kerja penuh dianggap telah tercapai apabila tingkat pengangguran sangat rendah.

3. Masalah Ketimpangan Pada Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran adalah ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Transaksi - transaksi ini meliputi transaksi barang dan jasa, dalam bentuk ekspor dan impor barang dan jasa, transaksi finansial seperti pemberian atau penerimaan kredit kepada atau dari negara lain, penanaman modal diluar negeri dan transaksi-transaksi yang bersifat unilateral seperti pembayaran transfer dari orang-orang yang tinggal diluarnegeri dan bantuan dari luar negeri.

Bila jumlah pembayaran keluar negeri tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diperoleh dari luar negeri, selisihnya dapat berupa surplus atau defisit pada neraca pembayaran. Surplus bila penerimaan melebihi pembayaran dan defisit bila sebaliknya. Bila suatu negara mengalami surplus atau defisit pada neraca pembayarannya disebut negara tersebut mengalami ketimpangan atau disequilibrium pada neraca pembayaran.

Ketimpangan atau ketidakseimbangan pada neraca pembayaran bisa menyebabkan masalah bila ketimpangan itu cukup besar dan menetap, dan dalam hal ini diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasinya.

4. Masalah Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi terpengaruh apabila masalah-masalah jangka pendek ekonomi makro seperti inflasi, pengangguran dan ketimpangan neraca pembayaran tidak bisa diatasi. Sebab pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kenaikan output perkapita, pertumbuhan ekonomi juga harus menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil perorangan, karena itu pertumbuhan ekonomi terjadi bila tingkat kenaikan output riil total lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk. Sebaliknya bila terjadi penurunan taraf hidup actual bila laju kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan output riil total.

D. KEBIJAKSANAAN EKONOMI MAKRO

Para pembuat kebijaksanaan mempunyai dua kelompok besar alternatif kebijaksanaan yang dapat dipergunakan untuk mempengaruhi kehidupan ekonomi. *Kebijaksanaan moneter yang diatur oleh bank sentral*, instrumen kebijaksanaan moneter

adalah perubahan cadangan uang yang beredar, perubahan tingkat suku bunga – tingkat diskonto – dimana bank sentral meminjamkan uang kebank komersial, dan pengawasan terhadap sistem perbankan. *Kebijaksanaan fiscal* adalah bidang kewenangan parlemen dan biasanya diprakarsai oleh lembaga eksekutif. Instrumen kebijaksanaan fiskal adalah tarif pajak dan besarnya pengeluaran pemerintah.

Satu dari kenyataan pokok kebijaksanaan adalah bahwa pengaruh kebijaksanaan moneter dan fiscal terhadap perekonomian tidak sepenuhnya dapat diramalkan, baik yang berkaitan dengan waktu maupun tingkat pengaruhnya terhadap permintaan dan penawaran. Kedua aspek ketidakpastian ini merupakan inti dari masalah kebijaksanaan stabilisasi. Kebijakan stabilisasi adalah kebijaksanaan moneter dan fiscal yang dirancang untuk memperlunak fluktuasi perekonomian – terutama fluktuasi pada laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran.

Kegagalan kebijaksanaan stabilisasi ini terjadi karena unsur ketidakpastian mekanisme kerja dari kebijaksanaan tersebut, maupun keterbatasan dampak dari kebijaksanaan tersebut terhadap perekonomian. Betapapun begitu masalah ekonomi politik juga terlibat dalam kebijaksanaan stabilisasi. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menghapus tingkat pengangguran, dengan konsekuensi meningkatnya laju inflasi, jelas merupakan suatu masalah penilaian mengenai kondisi perekonomian, maupun kerugian yang timbul akibat terjadinya kekeliruan. Mereka yang lebih mengkhawatirkan kerugian yang diakibatkan oleh pengangguran dibanding dengan kerugian yang terjadi karena adanya tekanan inflasi akan bersedia menanggung beban inflasi yang semakin tinggi untuk mengurangi pengangguran daripada mereka yang menganut pandangan sebaliknya.

Ekonomi politik mempengaruhi kebijaksanaan stabilisasi dengan cara yang lebih beragam disbanding dengan kemungkinan resiko yang seringkali dikaitkan oleh sejumlah pengambil kebijaksanaan dari aliran politik yang berbeda pada inflasi dan pengangguran dan resiko yang siap untuk mereka hadapi dalam rangka menyehatkan situasi kehidupan ekonomi, yang disebut dengan siklus ekonomi politik, yang pada prinsipnya di dasarkan pada observasi hasil pemilihan umum, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi ketika itu. Bila keadaan ekonomi telah membaik dan tingkat pengangguran telah menurun, presiden yang berkuasa akan cenderung untuk terpilih kembali. Dengan demikian para pembuat kebijaksanaan sangat terangsang untuk terpilih kembali, atau bagi siapa saja yang ingin

mempengaruhi hasil pemilihan umum, untuk menggunakan kebijaksanaan stabilisasi guna menciptakan kondisi ekonomi yang baik sebelum dilaksanakan pemilihan umum.

Kebijaksanaan stabilisasi juga dikenal dengan *countercyclical policy*, yakni kebijaksanaan untuk memperlunak siklus perdagangan ataupun siklus ekonomi. Prilaku dan bahkan keberadaan dari siklus perdagangan, sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan stabilisasi. Kebijaksanaan stabilisasi yang berhasil akan meratakan siklus yang terjadi, sementara kebijaksanaan stabilisasi yang gagal mungkin justru akan memperburuk fluktuasi prekonomian. Memang salah satu doktrin dari moneterisme adalah bahwa fluktuasi yang besar pada prekonomian lebih banyak terjadi karena tindakan pemerintah, dan bukan ketidakstabilan yang menjadi ciri dari sektor swasta dalam kegiatan ekonomi.

1. Lambatnya Implementasi Dan Dampak Kebijakan

Stabilisasi ekonomi akan mudah jika dampak kebijakan bersifat langsung. Membuat kebijakan akan serupa dengan mengendarai mobil, para pembuat kebijakan akan dengan mudah menyesuaikan instrument mereka untuk menjaga perekonomian tetap pada jalur yang diinginkan.

Namun membuat kebijakan ekonomi tidak sama serupa dengan mengendarai mobil, tetapi lebih mirip dengan mengemudikan sebuah kapal besar. Mobil mengubah arah nyaris setelah ban kemudi diubah arahnya, sebaliknya sebuah kapal mengubah jalur dengan waktu yang cukup lama setelah nahkoda menyesuaikan dengan kemudinya, dan sekali kapal itu mulai berubah arahnya, ia akan terus dalam kondisi seperti itu dalam beberapa saat walaupun kemudi dalam keadaan normal, nahkoda yang tidak berpengalaman cenderung terlalu jauh berbelok, dan setelah mengetahui kesalahannya, bertindak berlebihan dengan mengerakkan kemudi terlalu jauh kearah yang berlawanan. Lintasan kapal bisa jadi tidak stabil, ketika nahkoda yang kurang berpengalaman itu menanggapi kesalahan sebelumnya dengan membuat koreksi yang semakin besar.

Seperti nahkoda, para pembuat kebijakan ekonomi menghadapi masalah kelambanan/kesenjangan waktu yang lama. Tentu saja hal yang dihadapi para pembuat kebijakan lebih sulit, karena lamanya kelambanan/kesenjangan itu waktunya sulit untuk diprediksi. Kelambanan yang lama dan berubah-ubah ini sangat menyulitkan pelaksana kebijakan moneter dan fiscal.

Para ekonom membedakan antara dua kelambanan dalam pelaksanaan kebijakan stabilisasi tersebut yaitu kelambanan dalam dan kelambanan luar. Kelambanan dalam (inside lags) adalah waktu antara guncangan terhadap perekonomian dan tindakan kebijakan dalam menghadapinya. Kelambanan ini muncul karena para pembuat kebijakan membutuhkan waktu untuk menyadari bahwa sebuah keguncangan telah terjadi dan kemudian mengeluarkan kebijakan yang tepat. Kelambanan luar (outside lags) adalah waktu antara tindakan kebijakan dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Kelambanan ini muncul karena kebijakan yang dibuat tidak segera mempengaruhi pengeluaran, pendapatan dan kesempatan kerja.

Kelambanan dalam yang panjang adalah masalah sentral ketika menggunakan kebijakan fiskal untuk stabilisasi ekonomi. Hal ini terutama berlaku di Amerika Serikat, ketika perubahan pengeluaran atau pajak membutuhkan persetujuan presiden dan kongres. Proses legislatif yang lambat dan tidak praktis seringkali menimbulkan penundaan, yang membuat kebijakan fiskal sebagai sarana yang tidak ampuh untuk menstabilkan perekonomian. Kelambanan lebih pendek di negara-negara dengan sistem parlementer seperti Inggris karena partai yang berkuasa seringkali dapat dengan cepat melakukan perubahan kebijakan.

Kebijakan moneter memiliki kelambanan dalam yang jauh lebih pendek daripada kebijakan fiskal, karena bank sentral bisa memutuskan kebijakan kurang dari sehari, tetapi kebijakan moneter memiliki kelambanan luar yang cukup besar. Kebijakan moneter bekerja dengan jumlah uang yang beredar dan tingkat bunga, yang gilirannya mempengaruhi investasi. Tetapi banyak perusahaan membuat rencana investasi jauh setelah itu. Karena itu kebijakan moneter dianggap tidak mempengaruhi aktivitas ekonomi sampai kira-kira enam bulan setelah kebijakan ini dibuat.

Kelambanan yang lama dan berubah-ubah yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan fiskal tentu saja membuat stabilitas perekonomian menjadi lebih sulit. Para pendukung kebijakan pasif berpendapat bahwa, karena kelambanan ini, kebijakan stabilisasi nyaris tidak berhasil. Anggaph kondisi perekonomian berubah antara dimulainya tindakan kebijakan dan dampaknya terhadap perekonomian. Dalam kasus ini kebijakan aktif bisa mendorong perekonomian ketika perekonomian terlalu panas atau memperlambat perekonomian ketika perekonomian mendingin. Para pendukung kebijakan aktif

berpendapat bahwa kelambanan seperti itu harusnya membuat para kebijakan berhati-hati. Namun mereka beranggapan, kelambanan ini tidak berarti bahwa kebijakan bersifat pasif sepenuhnya, terutama dalam menghadapi kemerosotan ekonomi yang parah dan berlarut-larut.

Beberapa kebijakan disebut penstabil otomatis (*automatic stabilizer*), dirancang untuk menurunkan kelambanan yang terkait dengan kebijakan stabilisasi. Penstabil otomatis adalah kebijakan mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang disengaja. Misalnya system pajak pendapatan secara otomatis menurunkan pajak ketika perekonomian mengalami resesi, tanpa perubahan apapun dalam hukum pajak, karena individu dan perusahaan membayar pajak lebih kecil ketika pendapatan turun. Demikian pula sistem asuransi pengangguran dan kesejahteraan secara otomatis meningkatkan pembayaran transfer ketika perekonomian bergerak menuju resesi, karena lebih banyak orang yang bergantung pada tunjangan. Penstabil otomatis ini bisa dianggap sebagai jenis kebijakan fiscal tanpa kelambanan dalam.

2. Ketidakpercayaan Terhadap Para Pembuat Kebijakan Dan Proses Politik

Sebagian para ekonom percaya bahwa kebijakan ekonomi sangat penting untuk dilimpahkan kepada kebijaksanaan atau kehendak para pembuat kebijakan. Meskipun pandangan ini lebih bersifat politis daripada ekonomis, mengevaluasinya adalah sangat penting untuk menilai cara kebijakan ekonomi. Jika para politisi tidak kompeten atau oportunistis, maka kita tidak ingin memberi mereka kebijaksanaan untuk menggunakan perangkat kebijakan moneter dan fiscal.

Imkompetensi dalam kebijakan ekonomi muncul karena berbagai alasan, sebagian ekonom memandang proses politik sebagai tak menentu, barangkali karena proses politik mencerminkan pergeseran kekuasaan dari kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan khusus. Selain itu ilmu ekonomi makro merupakan ilmu yang rumit, dan para politisi tidak mempunyai atau memiliki pengetahuan yang memadai untuk menilai secara akurat. Ketidaktahuan ini membiarkan tukang obat memberikan obat penawar yang tidak benar tapi memiliki daya tarik yang superficial terhadap masalah-masalah yang kompleks. Proses politik seringkali tidak bisa memisahkan nasehat dari tukang obat yang tidak berguna dari nasehat para ekonom yang berkompeten.

Oportunisme dalam kebijakan ekonomi muncul ketika tujuan-tujuan dari para pembuat kebijakan bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat. Sebagian para ekonom khawatir bahwa para politisi menggunakan kebijakan makro ekonomi untuk kepentingan pribadi mereka sendiri dalam meraih dukungan public. Jika warga Negara memberikan suara atas dasar kondisi ekonomi yang sedang berlangsung pada saat pemilihan umum, maka para politisi memberikan insentif untuk menerapkan kebijakan yang akan membuat perekonomian kelihatan baik selama tahun-tahun pemilu. Para presiden bisa membuat resesi tak lama lama setelah memerintah dengan menurunkan inflasi kemudian mendorong perekonomian menjelang pemilu berikutnya untuk menurunkan pengangguran, itulah sebabnya mengapa inflasi dan pengangguran turun pada saat kampanye. Manipulasi ekonomi untuk kepentingan pemilu, yang disebut siklus bisnis politik (political business cycle), merupakan subyek penelitian ekstensif yang dilakukan para ekonom dan pakar-pakar politik.

Ketidakpercayaan terhadap proses politik menyebabkan sebagian para ekonom menganjurkan untuk menempatkan kebijakan ekonomi diluar realitas politik. Sebagian menawarkan amandemen konstitusi, seperti menawarkan amandemen anggaran berimbang, yang akan menyatukan para pembuat undang-undang dan melindungi perekonomian dari inkompetensi dan oportunisme.

E. SOAL LATIHAN

1. Buatlah Definisi Ilmu Ekonomi Makro menurut pendapat kamu
2. Jelaskan perbedaan Ilmu ekonomi makro dan Ilmu ekonomi mikro
3. Apa permasalahan ekonomi makro yang mendesak untuk diatasi saat ini
4. Jelaskan kaitan Inflasi dan pertumbuhan ekonomi
5. Apa tujuan kebijakan fiscal
6. Apakah yang dimaksud kelambanan luar dan kelambanan dalam
7. Mengapa ketidak percayaannya kepada proses politik mempengaruhi kondisi ekonomi
8. Bagaimana interpretasi seseorang terhadap sejarah makro ekonomi mempengaruhi pada kebijakan makro ekonomi
9. Apa kecenderungan yang dilakukan pemerintah apabila neraca pembayaran dalam keadaan surplus

10. Apa kecenderungan yang dilakukan pemerintah apabila neraca pembayaran dalam keadaan Defisit

DAFTAR REFERENSI

- Boediono, Ekonomi Makro, BPFE, Yogyakarta, 1983
Djamil Suyuthi, Pengantar Ekonomi Makro, P2LPTK, Jakarta, 1990
Dwi Eko, Ekonomi Makro, UMM, Malang, 2001
Farid Wijaya, Ekonomika Pertumbuhan dan Internasional, BPFE, Yogyakarta, 1992
Gregory Mankiw, Teori Makro Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 2003
Mulya Nasution, Teori Ekonomi Makro, Djambatan, Jakarta, 1997

KEGIATAN BELAJAR III

KERANGKA ANALISA EKONOMI MAKRO

Setelah kita mengetahui persoalan mengenai masalah-masalah pokok apa yang dikaji dalam ekonomi makro, maka pertanyaan selanjutnya adalah mengetahui bagaimana mengkaji masalah-masalah tersebut sehingga bisa diperoleh jawaban yang diinginkan. Seluruh buku adalah mencoba menjawab pertanyaan “bagaimana” ini, sehingga jawaban yang lengkap untuk pertanyaan tersebut akan diperoleh apabila buku telah selesai kita pelajari. Namun pada tahap ini kita bisa mulai menggambarkan bagaimana seorang ekonomi melihat struktur perekonomian dan kait-mengkait antara bagian-bagiannya secara makro. Dengan kata lain, kita bisa mulai mempelajari “kerangka analisa” dalam ekonomi makro.

Ada dua aspek utama dari kerangka analisa ini. Yang pertama adalah aspek mengenai “apa” yang disebut kegiatan ekonomi makro dan “dimana” kegiatan tersebut dilakukan. Yang kedua adalah aspek mengenai “siapa” pelaku-pelakunya. Aspek yang pertama berhubungan dengan Pasar ekonomi makro yang dibagi menjadi 4 (empat) yaitu pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Sedangkan aspek kedua yang berhubungan dengan pelaku-pelaku dalam ekonomi makro dibagi menjadi 5 (lima) yaitu rumah tangga, produsen, pemerintah, lembaga keuangan dan Negara lain.

Sehingga dari bab ini bisa kita buat tujuan instruksional khusus (TIK) adalah mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan dan menganalisa 4 (empat) pasar dalam ekonomi makro
2. Menjelaskan dan menganalisa 5 (lima) pelaku ekonomi makro
3. Mensintesis pasar dan pelaku ekonomi makro

A. EMPAT PASAR MAKRO

Dalam analisa ekonomi makro kita melihat kegiatan ekonomi nasional secara lebih menyeluruh dibanding dengan apa yang kita lakukan dalam Buku 1. Kita tidak lagi melihat pasar beras, pasar pakaian, pasar sepatu, pasar honda secara sendiri-sendiri. Ini sesuai dengan pengertian mengenai “pengendalian umum” di atas. Disini kita melihat pasar-pasar tersebut dan pasar-pasar barang/ jasa lainnya sebagai satu pasar besar, yang kita beri nama “pasar barang”. Tetapi dalam ekonomi makro kita tidak hanya mempelajari satu

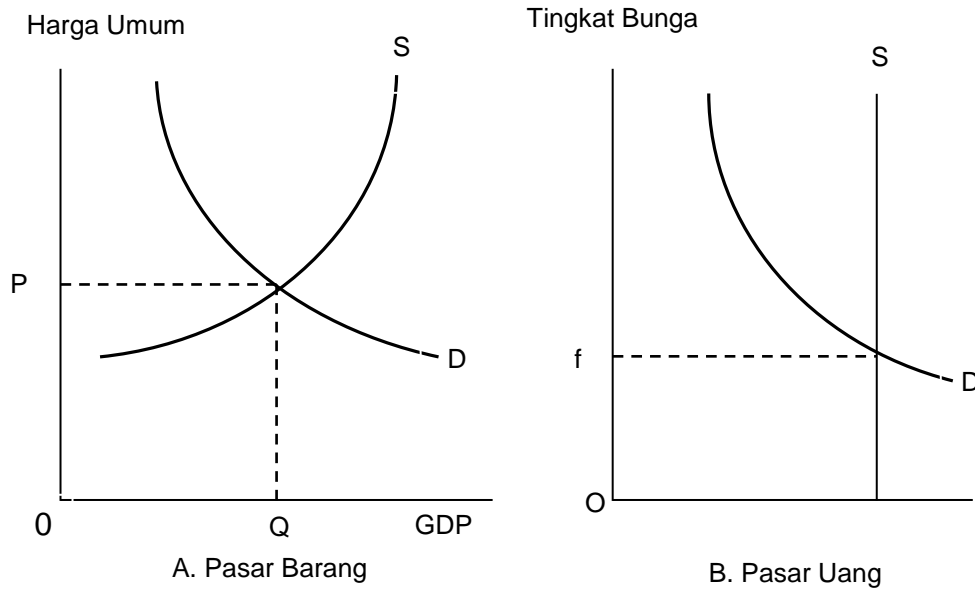
pasar ini saja. Perekonomian nasional kita sebagai suatu sistem yang terdiri dari empat pasar besar yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

1. Pasar Barang
2. Pasar Uang
3. Pasar Tenaga Kerja
4. Pasar Luar Negeri

Sejalan dengan pengertian kita mengenai “pasar” dalam teori ekonomi mikro, maka masing-masing pasar besar inipun kita bayangkan sebagai pertemuan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Di pasar barang, permintaan (total dari masyarakat) akan barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dan ditawarkan oleh seluruh produsen di masyarakat dalam suatu periode. Di pasar uang, permintaan (kebutuhan) masyarakat akan uang (kartal dan giral) bertemu dengan jumlah uang (kartal dan giral) yang beredar. Di pasar tenaga kerja, permintaan (kebutuhan) total akan tenaga kerja dari sector dunia usaha dan pemerintah bertemu dengan jumlah angkatan yang tersedia pada waktu itu. Di pasar luar negeri, permintaan dunia akan hasil-hasil ekspor kita bertemu dengan penawaran dari hasil-hasil tersebut yang bisa disediakan oleh eksportir-eksportir kita. Dan pada sisi lain, permintaan (kebutuhan) negara kita akan barang-barang impor bertemu dengan penawaran barang-barang tersebut oleh pihak luar negeri (*supply* barang-barang impor).

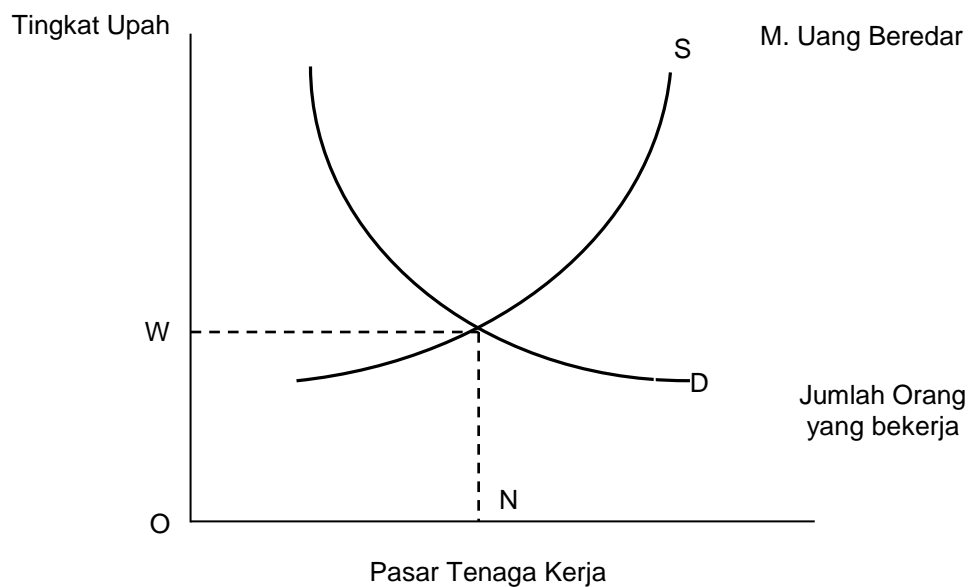
Sejalan dengan pengertian pasar dalam teori ekonomi mikro, maka dalam masing-masing pasar “makro” tersebut kita juga akan mempelajari dua aspek utama pasar; yaitu apa yang terjadi dengan harga (P) dengan kuantitas yang ditransaksikan (Q). Jadi dalam pasar barang, kita ingin mengetahui apa yang terjadi dengan tingkat harga umum (P) dari barang-barang/jasa-jasa (seperti yang dicerminkan oleh indeks harga yang merupakan ukuran tingkat harga dari suatu negara) dan apa yang terjadi dengan kuantitas total (Q) dari barang/jasa yang dipasarkan (biasanya dinyatakan oleh statistik GDP atau Gross Domestic Product, yaitu nilai dari semua hasil produksi akhir dari suatu negara). Dengan kata lain, dengan mempelajari pasar barang/jasa bisa mengetahui (a) tinggi rendahnya tingkat inflasi (gerak harga umum) dan (b) naik turunnya GDP (gerak produksi total). (Gambar 1.1.A.)

Di pasar uang permintaan akan uang dan penawaran akan uang menentukan “harga” dari uang atau harga dari penggunaan uang (yang dipinjamkan) yaitu tidak lain adalah tingkat bunga dan jumlah uang (giral dan kartal) yang beredar. (Gambar 1.1.B.)



Gambar 1

Di pasar tenaga kerja permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan “harga” tenaga kerja, yaitu tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dipekerjakan atau employment. (Gambar 1.2)



Gambar 1.2

Di pasar luar negeri permintaan akan barang ekspor kita bersama dengan penawaran akan barang tersebut menentukan harga rata-rata ekspor kita dan kuantitas atau volume - ekspor. Harga rata-rata dikalikan volume ekspor memberikan penerimaan devisa dari ekspor. Di pasar yang sama permintaan masyarakat kita akan barang-barang impor memberikan pengeluaran devisa kita untuk impor barang-barang/jasa tersebut. Untuk pasar luar negeri, seringkali kita menggabungkan pasar ekspor dan pasar impor dan mengamati apa yang terjadi dengan:

1. Neraca Perdagangan, yaitu penerimaan devisa ekspor dagangan, yaitu penerimaan devisa ekspor dikurangi pengeluaran devisa impor; atau Neraca pembayaran apabila kita ingin mengetahui tentang aliran keluar masuknya modal.
2. Dasar penukaran Luar Negeri (terms of trade), yaitu harga rata-rata ekspor kita dibagi dengan harga rata-rata impor kita.
3. Cadangan Devisa, yaitu persediaan devisa yang kita punyai pada awal tahun plus saldo neraca pembayaran.

Secara ringkas persoalan-persoalan yang kita pelajari dalam teori ekonomi makro adalah seperti yang tercantum dalam tabel 1.1. berikut ini.

Tabel 1.1

Pasar	Hal-Hal Yang Kita Pelajari Perilakunya	Angka-Angka Statistik Yang Kita Amati Dalam Praktek
1. Pasar Barang	Tingkat arga umum GDP	Indeks Biaya hidup GDP Implicit Deflator *) Statistik GDP dengan harga Konstan
2. Pasar Uang	Tingkat Bunga, Volume Uang	Bunga atas deposito Bunga atas pinjaman Bank Jumlah uang (kartal & giral) yang beredar Kredit yang diberikan oleh Bank
3. Pasar Tenagakerja	Tingkat upah rata-rata Employment (orang yang bekerja) Unemployment (pengangguran)	Indeks-indeks upah diberbagai sektor diberbagai sektor ekonomi Jumlah orang yang bekerja diberbagai sektor Jumlah angkatan kerja Angkatan kerja minus Jumlah orang yang bekerja

4. Pasar Luar Negeri	Neraca Perdagangan	Statistik Neraca Perdagangan
	Dasar Penukaran (Terms of Trade)	Angka-angka ekspor dan impor Statistik dasar penukaran
	Cadangan Devisa	Statistik cadangan devisa

*) GDP nominal (GDP pada harga yang berlaku) dibagi dengan GDP riil (GDP pada harga konstan). Angka ini merupakan angka indeks harga yang paling luas karena mencakup semua barang (konsumsi, investasi, ekspor, impor) yang masuk dalam GDP.

Teori ekonomi makro mempelajari faktor-faktor apa yang mempengaruhi P dan Q di masing-masing pasar. Karena P dan Q adalah hasil pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran, maka ini berarti teori ekonomi makro pada pokoknya mempelajari faktor-faktor apa yang mempengaruhi posisi kurva permintaan dan penawaran di masing-masing pasar.

Dengan mengetahui faktor-faktor ini dan pengaruhnya terhadap posisi kurva permintaan dan penawaran, maka kita selanjutnya bisa menanyakan faktor-faktor mana diantara semua faktor-faktor tersebut yang bisa dipengaruhi oleh permintaan melalui kebijakan-kebijaksanaan ekonominya. Dengan demikian kita bisa mengetahui kebijakan-kebijaksanaan mana yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengetahui P & Q dimasing-masing pasar. Inilah tujuan terakhir dari mempelajari teori makro, yaitu untuk digunakan sebagai petunjuk bagi pemilihan atau perumusan kebijakan.

B. LIMA PELAKU EKONOMI

Dalam teori ekonomi makro kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi lima kelompok besar yaitu:

1. Rumah Tangga
2. Produsen
3. Pemerintah
4. Lembaga-lembaga keuangan
5. Negara-negara lain

Kegiatan dari kelima kelompok pelaku ini serta kaitannya dengan keempat pasar diatas bisa kita lihat berikut ini:

Kelompok Rumah tangga melakukan kegiatan pokok berupa:

- (a) Menerima penghasilan dari para produsen dari penjualan tenaga kerja mereka (upah), deviden dan darimenyewakan tanah hak milik mereka;
- (b) Menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka;
- (c) Membelanjakan penghasilan tersebut di pasar barang (sebagai konsumen)
- (d) Menyisihkan sisa dari penghasilan tersebut ditabung pada lembaga-lembaga keuangan;
- (e) Membayar pajak kepada pemerintah;
- (f) Masuk dalam pasar sebagai peminta (demanders) karena kebutuhan mereka akan uang tunai misalnya transaksi sehari-hari.

Kelompok produsen melakukan kegiatan pokok berupa:

- (a) Memproduksi dan menjual barang/jasa (yaitu sebagai supplier dipasar barang);
- (b) Menyewakan/menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh kelompok rumah tangga untuk proses produksi;
- (c) Menentukan pembelian barang-barang modal dan stock barang lain (selaku investor masuk kedalam pasar barang sebagai peminta atau demande);
- (d) Meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka (sebagai demander dipasar uang);
- (e) Membayar pajak

Kelompok lembaga keuangan mencakup semua bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya kecuali bank sentral (Bank Indonesia) kegiatan mereka berupa:

- (a) Menerima simpanan/deposito dari rumah tangga
- (b) Menyediakan kredit dan uang giral (sebagai supplier dalam pasar uang).

Pemerintah (termasuk didalamnya Bank sentral) melakukan kegiatan berupa:

- (a) Menarik pajak langsung dan tidak langsung
- (b) Membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah (sebagai demander dipasar barang);

- (c) Meminjam uang dari luar negeri;
- (d) Menyewa tenaga kerja (sebagai demander dipasar tenaga kerja);
- (e) Menyediakan kebutuhan uang (kartal) bagi masyarakat (sebagai supplier dipasar uang).

Negara-negara lain melakukan kegiatan berupa:

- (a) Menyediakan kebutuhan barang (sebagai supplier dipasar barang);
- (b) Membeli hasil-hasil ekspor kita (sebagai demander dipasar barang);
- (c) Menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri;
- (d) Membeli dari pasar barang untuk kebutuhan cabang perusahaannya di Indonesia (sebagai investor)
- (e) Masuk kedalam pasar uang kedalam negeri sebagai penyalur uang (devisa) dari luar negeri (sebagai supplier dana) dan sebagai peminta kredit dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan cabang perusahaannya di Indonesia (demander dana).

C. SOAL LATIHAN

1. Jelaskan secara singkat mengenai Kerangka Analisa Ekonomi Makro
2. Menurut pendapat anda kegunaan seperti apa yang kita dapat dalam mempelajari pasar ekonomi makro
3. Jelaskan fungsi pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi
4. Bagaimana pengukuran dalam pasar tenaga kerja
5. Jelaskan factor yang mempengaruhi dalam Pasar luar negeri
6. Mengapa lembaga-lembaga keuangan menjadi salah satu pelaku ekonomi
7. Mengapa dalam pasar uang sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga
8. Mengapa pasar barang bisa berfungsi untuk mengendalikan tingkat inflasi yang terjadi dalam perekonomian suatu Negara
9. Jelaskan secara singkat kaitan 4 pasar dalam ekonomi makro
10. Jelaskan secara singkat kaitan 5 pelaku ekonomi makro

DAFTAR REFERENSI

Boediono, Ekonomi Makro, BPFE, Yogyakarta, 1983

Djamil Suyuthi, Pengantar Ekonomi Makro, P2LPTK, Jakarta, 1990

Farid Wijaya, Ekonomika Pertumbuhan dan Internasional, BPFE, Yogyakarta, 1992

Mulya Nasution, Teori Ekonomi Makro, Djambatan, Jakarta, 1997

KEGIATAN BELAJAR IV

BEBERAPA KELEMAHAN SISTEM MEKANISME PASAR DAN BENTUK-BENTUK CAMPUR TANGAN PEMERINTAH

Dalam pandangan kaum klasik sangat mempercayai hukum mekanisme pasar, bahwa setiap barang yang akan masuk dipasaran dengan sendirinya akan stabil karena akan ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi apa yang terjadi kemudian terjadinya over produksi sebab turunnya daya beli masyarakat dan akhirnya terjadi resesi dunia.

Hal itu bisa terjadi karena menurut pandangan kaum klasik bahwa tidak diperlukannya campur tangan pemerintah dalam pasar. Setelah kejadian itu timbullah pandangan/aliran baru dalam ekonomi yaitu aliran Keynes yang menyatakan bahwa campur tangan pemerintah itu sangat perlu paling tidak untuk menstabilkan pasar apabila terjadi masalah.

Dalam bab ini kita membahas kelemahan system mekanisme pasar dan bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi dalam negeri.

Sehingga kita perlu membuat tujuan instruksional khusus (TIK), setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan kelemahan system mekanisme pasar
2. Menjelaskan bentuk campur tangan pemerintah
3. Menjelaskan dan menganalisa langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam perekonomian

A. CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

Menyadari terdapat beberapa kelemahan dalam sistem mekanisme pasar, pemerintah diperlukan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi agar mekanisme pasar dapat berjalan lebih efisien. Tanpa campur tangan pemerintah kegiatan-kegiatan ekonomi tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat yaitu berkurangnya pengangguran, keadaan perekonomian yang stabil, distribusi pendapatan yang lebih merata berbagai golongan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berjalan secara terus menerus dan sebagainya.

Walaupun terdapat keyakinan meluas tentang pentingnya campur tangan pemerintah, ahli-ahli ekonomi dan ahli-ahli ilmu politik tidak mempunyai kesatuan pendapat tentang sejauh

mana pemerintah harus campur tangan dalam mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Segolongan dari mereka menginginkan campur tangan pemerintah sampai seminimal mungkin, sebagian yang lainnya menginginkan seluas mungkin. Bentuk campur tangan pemerintah dalam setiap perekonomian campuran dapat dibagi dalam tiga golongan: (a) Membuat aturan-aturan yang mempertinggi mekanisme pasar, (b) secara langsung menjalankan beberapa kegiatan ekonomi, (c) menjalankan kebijaksanaan moneter dan fiskal untuk mengelakkan akibat buruk yang mungkin ditimbulkan mekanisme pasar.

B. BEBERAPA KEBURUKAN SISTEM MEKANISME PASAR

1. Keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan

Perekonomian pasar yang sempurna sangat sukar diwujudkan didunia ini karena wujud keadaan perekonomian banyak yang tidak sesuai yang sebenarnya dalam perekonomian pasar. Dalam suatu perekonomian pasar yang sempurna dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi terutama diantara modal dan tenaga kerja dapat menggantikan satu sama lain, hal ini tidak selalu benar dalam kenyataan.

Salah satu dari ketidak sempurnaan dalam mekanisme pasar adalah ketidak sempurnaan persaingan yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi. Dalam perekonomian berkembang banyak terdapat perusahaan-perusahaan berkembang lebih cepat dari yang lainnya. Akhirnya mereka merupakan perusahaan yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi keadaan pasar. Berbagai perusahaan itu akan dapat mempengaruhi penentuan tingkat gaji dan upah, tingkat harga barang-barang dan jenis-jenis barang yang dihasilkan dalam perekonomian. Persaingan sempurna hanya akan berlaku apabila dalam perekonomian terdapat banyak produsen sehingga masing-masing produsen tidak dapat menguasai keadaan pasar.

2. Perbedaan diantara keuntungan pribadi dan Sosial

Kemungkinan terdapat perbedaan antara keuntungan pribadi dan keuntungan sosial merupakan salah satu sosial lain yang menyebabkan ketidakpuasan atas sosial mekanisme pasar. Keuntungan pribadi adalah keuntungan yang diperoleh seseorang dari menjalankan kegiatan ekonomi. Sedangkan keuntungan sosial adalah keuntungan yang diperoleh masyarakat atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam berbagai kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk suatu sosial seringkali terdapat perbedaan diantara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Usaha-usaha para pengusaha untuk memperoleh keuntungan adakalanya menimbulkan akibat-akibat buruk dalam masyarakat. Dalam keadaan seperti itu campur tangan pemerintah diperlukan, dan tujuannya supaya usaha-usaha para pengusaha untuk memaksimalkan keuntungannya tidak merugikan masyarakat.

3. Mekanisme pasar dan tingkat penggunaan tenaga kerja

Kegagalan perekonomian pasar untuk menciptakan distribusi pendapatan yang merata merupakan satu alasan lain yang menyebabkan pemerintah memperbesar campur tangannya dalam kegiatan ekonomi. Perekonomian pasar cenderung untuk memberikan balas jasa kepada pihak-pihak yang memberikan kesanggupan untuk bekerja lebih keras dan lebih efisien, mempunyai kepandaian dan keahlian yang lebih baik, dan memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih kreatif. Maka dalam perekonomian pasar yang berkembang akan terdapat segolongan masyarakat yang memperoleh pendapatan sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari golongan masyarakat lainnya. Berlakunya perbedaan kekayaan yang sangat besar didalam perekonomian pasar menimbulkan kritik atas efisiensi mekanisme pasar untuk menciptakan distribusi pendapatan yang adil dalam masyarakat.

C. BENTUK-BENTUK CAMPUR TANGAN PEMERINTAH

Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam perekonomian campuran dapat digolongkan menjadi 3 Yaitu:

1. Membuat peraturan untuk mempertinggi efisiensi mekanisme pasar

Salah satu cara yang dapat digunakan Pemerintah untuk mempertinggi efisiensi kegiatan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan lainnya dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonomi adalah dengan membuat peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam negara. Peraturan-peraturan yang dibuat Pemerintah di dalam usaha untuk mempertinggi efisiensi mekanisme pasar dapat mencapai dua tujuan utama, Yang pertama, peraturan-peraturan akan dapat menciptakan suasana ekonomi dan sosial yang akan memberikan dorongan ke arah terciptanya sistem mekanisme pasar yang efisien. Yang kedua, peraturan-peraturan dapat digunakan untuk memastikan agar persaingan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dilakukan sebebaskan mungkin dan kekuatan-kekuatan monopoli sedapat mungkin dilenyapkan. Kedua-

dua peranan dari peraturan-peraturan Pemerintah ini didalam menyempurnakan mekanisme pasar diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

2. Menciptakan rangka dasar sosial ekonomi bagi mekanisme pasar yang efisien

Pentingnya membuat peraturan-peraturan yang akan menjamin berfungsinya mekanisme pasar secara efisien dapat dengan jelas dilihat apabila diperhatikan akibat-akibat buruk yang mungkin timbul sekiranya setiap pelaku ekonomi diberikan kebebasan yang tidak terbatas dalam melakukan kegiatan ekonominya. Tujuan setiap individu atau perusahaan untuk mencapai keuntungan yang maksimal bagi dirinya adakalanya akan sangat merugikan masyarakat.

Untuk menghindari keadaan-keadaan seperti yang dijelaskan di atas Pemerintah membuat peraturan-peraturan yang pada hakekatnya bertujuan untuk membuat “aturan permainan” didalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yaitu menentukan hal-hal yang boleh, dan yang tidak boleh, dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi mereka. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut para pelaku ekonomi akan mengetahui hak-hak maupun kewajiban-kewajibannya di dalam setiap kegiatan ekonominya. Untuk menjaga agar para pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi mereka tanpa melanggar “aturan permainan” yang telah ditetapkan. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan hukuman kepada individu atau perusahaan yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkannya. Pemerintah, misalnya akan menentukan bentuk hukuman bagi individu-individu atau perusahaan-perusahaan yang tidak membayar hutang, atau kepada individu-individu atau perusahaan-perusahaan yang menjual barang yang tidak sesuai dengan persetujuan dalam kontrak.

3. Menciptakan persaingan bebas

Tujuan kedua dari membuat peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi adalah untuk menjamin agar dalam ekonomi tidak terdapat kekuatan monopoli dan setiap pelaku ekonomi dapat menjalankan kegiatannya dalam suasana persaingan bebas. Berlakunya persaingan yang bebas merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien dan berjalan dengan lancar.

Dalam pasar bebas jenis dan jumlah barang-barang yang diproduksi dan tingkat harga barang ditentukan oleh kehendak pembeli. Dalam sistem perekonomian pasar bebas, segolongan perusahaan tidak akan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi

keadaan pasar. Para pengusaha tidak akan mempunyai kekuatan untuk menaikkan harga dengan membatasi penawaran di pasar. Demikian juga apabila suatu perusahaan yang menghasilkan barang yang tidak dikehendaki masyarakat, barang itu tidak akan laku dan perusahaan akan tutup. Dan apabila suatu perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh pasar, barang itu tidak akan dibeli oleh masyarakat, dan pada akhirnya perusahaan harus menghentikan usahanya.

Apabila dalam perekonomian terdapat kekuatan monopoli keadaan yang berlaku di pasar lebih banyak dipengaruhi oleh pengusaha. Mereka akan mempunyai kuasa untuk menentukan jumlah, jenis dan harga barang-barang yang diperjual belikan dalam perekonomian. Apabila satu atau beberapa perusahaan mempunyai kekuatan monopoli maka mereka akan mempunyai kekuasaan untuk mengawasi jumlah produksi sehingga mereka dapat mencapai keuntungan maksimal. Pada umumnya keadaan ini tercapai sebelum perusahaan mencapai tingkat efisiensi produksi yang optimal. Keadaan yang sebaliknya berlaku dalam perekonomian pasar bebas produsen tetap berusaha memaksimalkan keuntungan, tetapi karena ia tidak dapat mempengaruhi tingkat harga pasar keuntungan yang maksimal tersebut baru akan tercapai apabila perusahaan mencapai tingkat efisiensi yang optimal.

Dengan melakukan pengawasan atas jumlah produksi maka harga barang akan dapat dipengaruhi. Apabila terdapat kekuasaan monopoli dalam pasar, harga cenderung menjadi lebih tinggi. Adakalanya perusahaan menurunkan harga untuk menarik jumlah pembeli.

1. Campur tangan langsung dalam kegiatan ekonomi

Dalam beberapa kegiatan tertentu peraturan-peraturan saja belum dapat memberi jaminan bahwa kegiatan-kegiatan itu dapat dilaksanakan dengan efisien, atau memberikan keuntungan bagi masyarakat. Adakalanya masyarakat memperoleh keuntungan apabila kegiatan ekonomi langsung dilakukan oleh pihak Pemerintah. Pemerintah akan melakukan campur tangan secara langsung dalam melakukan kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat.

a. Memproduksi barang bersama dan barang semi bersama

Salah satu faktor penting yang mendorong Pemerintah untuk ikut serta langsung menjalankan kegiatan ekonomi adalah untuk menyediakan barang bersama yaitu

barang yang tidak dapat digunakan secara perseorangan tetapi harus digunakan secara bersama oleh masyarakat. Misalnya, menyediakan tentara dan polisi untuk menjamin pertahanan dan keamanan nasional. Terdapat juga beberapa kegiatan yang pada umumnya hanya dilakukan oleh pihak Pemerintah akan tetapi sebenarnya masih dapat dijalankan oleh pihak swasta, antara lain: kegiatan pendidikan, jasa unit pemadam kebakaran dan lain-lain.

b. Tujuan lain dari campur tangan Pemerintah

Salah satu tujuan Pemerintah untuk secara langsung melakukan kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang sebenarnya dapat diserahkan pada pihak swasta adalah untuk menjamin agar barang atau jasa dapat disediakan pada masyarakat dengan harga murah tanpa mengurangi efisiensinya. Perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah dapat menawarkan barang atau jasa dengan harga yang lebih murah. Karena perusahaan itu tidak menekankan pada mencari keuntungan, bahkan adakalanya Pemerintah menjamin agar harga barang tersebut tetap murah dengan memberikan bantuan keuangan.

c. Menjalankan Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengawasi jumlah penawaran uang dalam masyarakat. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan Pemerintah di dalam memungut pajak dan membelanjakan pendapatan pajak untuk membiayai kegiatannya. Didalam ekonomi kedua kebijakan ini digunakan oleh Pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu:

- Untuk mengatasi masalah pokok ekonomi makro yang selalu timbul, yaitu: masalah pengangguran, masalah inflasi dan masalah menciptakan pertumbuhan ekonomi.
- Untuk menjamin agar faktor-faktor produksi digunakan dan dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara efisien.
- Melalui kebijakan fiskal, pemerintah menjalankan kebijakan dengan maksud untuk memperbaiki keadaan distribusi pendapatan yang tidak merata yang selalu tercipta dalam masyarakat yang kegiatan ekonominya diatur oleh sistem pasar bebas.

Ketiga tujuan kebijaksanaan fiscal dan kebijaksanaan moneter diatas diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

a. Mengatasi masalah-masalah pokok ekonomi makro

Dalam jangka pendek setiap perekonomian selalu diancam oleh masalah pengangguran atau inflasi yang akhir-akhir ini sering terjadi secara sekaligus. Sedangkan dalam jangka panjang setiap perekonomian selalu menghadapi masalah ketidakseimbangan diantara (a) keperluan untuk mengembangkan perekonomian dengan cepat agar faktor-faktor produksi yang bertambah dapat sepenuhnya digunakan dengan (b) tambahan penggunaan faktor-faktor produksi yang sebenarnya terjadi. Pada umumnya faktor produksi yang sebenarnya terjadi lebih lambat daripada yang digunakan dan oleh karenanya penggunaan faktor produksi merupakan masalah yang terus dihadapi dalam jangka panjang. Masalah-masalah pokok ekonomi makro yang dijelaskan ini dapat diatasi oleh Pemerintah dengan menjalankan kebijaksanaan moneter dan fiskal.

Pada mulanya kebijaksanaan moneter digunakan untuk mengendalikan tingkat harga-harga yaitu menjaga agar harga-harga dapat dipertahankan supaya tetap stabil. Tetapi selanjutnya kebijakan moneter telah aktif digunakan untuk menggalakkan kegiatan ekonomi didalam masa pengangguran dan sebagai alat untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Timbulnya perubahan dalam kebijaksanaan moneter disebabkan oleh perubahan pandangan mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi. Fungsi dari kebijaksanaan moneter adalah untuk mengawasi supaya setiap saat jumlah dan penawaran uang dalam perekonomian akan membantu menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Kebijaksanaan fiskal mulai digunakan secara aktif untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pemerintah haruslah membuat pengeluaran sama dengan pendapatannya, anggaran belanja yang demikian dinamakan anggaran belanja seimbang. Pengeluaran Pemerintah yang melebihi penerimaannya sehingga mengharuskan Pemerintah meminjam dari masyarakat atau mencetak uang dipandang sebagai tindakan kurang bijaksana.

Sekarang ini kebanyakan negara, Pemerintahnya tidak selalu berusaha agar anggaran belanjanya selalu dalam keadaan seimbang. Anggaran belanja Pemerintah selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada waktu tertentu. Pada waktu kegiatan tingkat ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, pemerintah akan melakukan pengeluaran melebihi pendapatannya, anggaran belanja tersebut dinamakan anggaran

belanja defisit. Akan tetapi sekiranya yang dihadapi Pemerintah adalah keadaan dimana tingkat kegiatan ekonomi tinggi tidak terjadi pengangguran dan kenaikan harga, Pemerintah akan berusaha agar pengeluarannya lebih sedikit dari penerimaannya sehingga Pemerintah dapat membuat tabungan dari pendapatannya, anggaran belanja yang demikian yang dinamakan anggaran belanja surplus. Dengan demikian kebijaksanaan fiskal pada hakekatnya dijalankan untuk menentukan bentuk anggaran belanja yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada saat itu.

b. Mempertinggi efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi

Biasanya setiap masyarakat menginginkan agar faktor-faktor produksi digunakan secara seimbang di berbagai sektor ekonomi, di berbagai wilayah dan diantara golongan-golongan masyarakat. Dengan cara demikian distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan di berbagai sektor, wilayah dan golongan masyarakat dapat tercipta. Di dalam perekonomian pasar tanpa campur tangan Pemerintah keadaan seperti itu jarang berlaku. Sistem mekanisme pasar cenderung akan menciptakan ketidakseimbangan dalam perkembangan diantara berbagai sektor, wilayah dan golongan masyarakat. Dan di dalam masa-masa berikutnya ketidakseimbangan yang timbul akan menjadi bertambah melebar. Sektor yang lebih maju akan mengalami perkembangan yang lebih cepat lagi, wilayah yang lebih maju akan menjadi penghambat kepada perkembangan wilayah yang lebih miskin, dan golongan yang lebih kaya akan menjadi bertambah kaya lagi sedangkan yang lebih miskin menghadapi lebih banyak kesulitan untuk menaikkan pendapatan mereka. Keadaan yang seperti itu bukanlah keadaan yang diinginkan oleh masyarakat dan sangat merugikan Negara.

Untuk mengatasi masalah yang baru saja diterangkan, salah satu langkah penting yang selalu dijalankan Pemerintah adalah dengan menggunakan kebijaksanaan fiskal dan kebijaksanaan moneter. Pemerintah akan membuat pengeluaran yang lebih banyak ke sektor, wilayah dan golongan masyarakat yang kedudukan ekonominya lebih mundur. Dan dengan memberikan perangsang moneter (misalnya memberikan fasilitas pinjaman yang lebih baik dan bunga pinjaman yang lebih rendah) dan perangsang fiskal (dalam bentuk pengecualian membayar pajak selama beberapa tahun, percepatan penyusutan modal dan sebagainya). Pemerintah menggalakkan para pengusaha untuk menanam modal lebih banyak ke sektor atau wilayah yang relatif kurang berkembang.

Berikut ini dikemukakan satu contoh lain yang menunjukkan tentang peranan kebijaksanaan fiskal dan moneter untuk meninggikan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Di negara-negara berkembang biasanya industri-industrinya tidak dapat bersaing dengan industri-industri di negara-negara maju. Barang-barang industri di negara-negara maju lebih tinggi mutunya daripada di negara-negara berkembang. Maka kalau perekonomian itu hanya diatur oleh mekanisme pasar negara-negara berkembang tidak akan dapat mengembangkan industri-industrinya. Menghadapi masalah ini negara-negara berkembang menggunakan kebijaksanaan moneter maupun fiskal untuk memastikan agar sektor industri dapat berkembang secara memuaskan di negara-negara tersebut. Pemerintah akan menggalakkan Bank-bank perdagangan dan badan-badan keuangan lainnya untuk memberikan fasilitas-fasilitas pinjaman bersyarat ringan kepada penanam-penanam modal di bidang industri, pajak yang tinggi dikenakan kepada barang-barang industri yang diimpor dan pajak yang sangat rendah dikenakan atas barang-barang modal dan bahan-bahan mentah industri yang diimpor.

c. Peranan Pemerintah dalam perbaikan distribusi pendapatan

Beberapa negara maju kerap kali dinamakan sebagai “*welfare state*” atau “*negara kesejahteraan*”. Dinamakan demikian karena negara-negara itu membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bertujuan untuk lebih meratakan pendapatan masyarakatnya, sehingga perbedaan diantara golongan masyarakat yang sangat kaya dengan yang sangat miskin tidak begitu mencolok. Tujuan itu dicapai terutama dengan menggunakan kebijaksanaan fiskal. Bentuk kebijaksanaan itu adalah: (i) menjalankan sistem pajak yang bersifat progresif dan: (ii) melakukan kebijaksanaan perbelanjaan Pemerintah yang bersifat membantu golongan masyarakat yang sangat miskin.

Sistem perpajakan dapat dibedakan di dalam tiga jenis: pajak progresif, pajak regresif dan pajak proporsional. Yang dimaksudkan dengan sistem perpajakan progresif adalah sistem perpajakan dimana tingkat pajak yang harus dibayar menjadi bertambah besar apabila pendapatan menjadi bertambah tinggi. Sebagai contoh, apabila pendapatan seseorang adalah Rp. 200.000 setahun tingkat pajaknya adalah 10 persen dari pendapatan itu, tetapi apabila pendapatannya adalah 400.000 setahun tingkat pajaknya menjadi 20 persen, maka sistem perpajakan seperti ini dinamakan sistem perpajakan progresif. Sistem perpajakan regresif adalah kebalikan dari sistem perpajakan progresif,

yaitu makin tinggi pendapatan makin kecil tingkat pajaknya. Sedangkan sistem perpajakan proporsional adalah sistem perpajakan dimana tingkat pajak adalah sama besarnya untuk berbagai tingkat pendapatan. Walaupun pendapatan sangat tinggi tingkat pajaknya tidak berbeda dengan yang dikenakan kepada pendapatan rendah, misalnya tetap sebesar 15 persen dari pendapatan. Di banyak negara sistem pajak yang banyak digunakan adalah sistem pajak progresif, berarti makin besar pendapatan makin besar pula proporsi dari pendapatan itu yang akan digunakan untuk membayar pajak. Maka pendapatan yang boleh digunakan untuk membiayai pengeluaran penerima pendapatan itu adalah jauh lebih kecil daripada pendapatannya yang sebenarnya. Dengan cara ini jurang perbedaan pendapatan diantara golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi dan golongan masyarakat yang berpendapatan rendah dapat dikurangkan.

Di samping itu dengan menggunakan sistem perpajakan progresif, usaha untuk menyeimbangkan pendapatan dalam masyarakat dapat pula dengan melakukan pengeluaran Pemerintah yang bersifat membantu golongan-golongan masyarakat yang sangat miskin. Perbelanjaan demikian dinamakan "*welfare expenditure*" atau "*pengeluaran kesejahteraan*". Tujuannya ialah untuk memberikan bantuan keuangan kepada golongan penduduk yang sangat miskin sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.

D. SOAL LATIHAN

1. Salah satu keburukan mekanisme pasar adalah keadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, jelaskan
2. Apa keinginan pemerintah dengan melakukan campur tangan langsung dalam kegiatan ekonomi, jelaskan
3. Apa tujuan pemerintah mengambil kebijakan moneter dan fiscal
4. Apa Kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam perbaikan distribusi pendapatan
5. Mengapa perbedaan diantara keuntungan pribadi dan social menjadi salah satu keburukan mekanisme pasar
6. Jelaskan mengenai tujuan pengeluaran kesejahteraan
7. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi mekanisme pasar dan tingkat penggunaan tenaga kerja

8. Menurut pendapat anda apakah dengan system perpajakan progresif dapat mengatasi masalah perbaikan distribusi pendapatan
9. Menurut pendapat anda kebijakan apa yang seharusnya diambil pemerintah untuk meninggikan efesiensi penggunaan factor produksi
10. Apa tujuan pemerintah untuk memproduksi barang bersama dan barang semi bersama

DAFTAR REFERENSI

Boediono, Ekonomi Makro, BPFE, Yogyakarta, 1983

Farid Wijaya, Ekonomika Pertumbuhan dan Internasional, BPFE, Yogyakarta, 1992

Mulya Nasution, Teori Ekonomi Makro, Djambatan, Jakarta, 1997

Soelistyo, Teori Ekonomi Makro I, Karunika, Jakarta, 1998

KEGIATAN BELAJAR V

TEORI MAKRO KLASIK

Teori Makro klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith pada jaman nya adalah suatu langkah maju dalam perkembangan ilmu ekonomi dan menjadi acuan setiap Negara untuk mengembangkan perekonomiannya.

Banyak pemikiran yang dicetuskan oleh Adam Smith yang dibahas dalam Bab ini antara lain tentang empat pasar dalam ekonomi makro, campur tangan pemerintah dalam perekonomian, bagaimana mencapai tingkat kegiatan ekonomi yang optimal.

Dalam empat pasar dalam ekonomi makro kaum klasik memberikan pandangan atas hubungan tiap pasar dan apa yang dilakukan seseorang apabila mengamati kondisi pasar, untuk campur tangan pemerintah kaum klasik mempertegas bahwa campur tangan pemerintah di perlukan hanya bidang pertahanan dan keamanan serta hokum, dan untuk masalah perekonomian tidak diperlukan biarkanlah pasar yang menentukan. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi yang optimal hal yang paling penting dikatakan adalah tidak ada penggangguan dalam kegiatan ekonomi yang optimal.

Dan untuk memberikan arahan pada mahasiswa dalam mempelajari bahan ini diperlukan adanya Tujuan instruksional khusus (TIK), sehingga mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan dan menganalisa pandangan kaum klasik tentang pasar dalam ekonomi makro
2. Menjelaskan dan menganalisa tentang campur tangan pemerintah
3. Menganalisa secara garis besar kelemahan pandangan kaum klasik

A. DASAR FILSAFAT KAUM KLASIK

Kaum Klasik adalah orang yang percaya akan keampuhan sistem ekonomi yang "liberal". Mereka secara ideologis percaya bahwa sistem Laissez faire atau system dimana setiap orang betul-betul bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi apapun (dalam batas-batas hokum yang berlaku) bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara otomatis.

Sistem bebas berusaha, di mana campur tangan pemerintah adalah minimal, menurut kaum Klasik, bisa menjamin dicapainya:

1. Tingkat kegiatan ekonomi nasional yang optimal (full employment level of activity).

2. Alokasi sumber-sumber alam dan faktor-faktor produksi lain diantara berbagai macam kegiatan ekonomi secara efisien.

Menurut mereka, peranan pemerintah harus dibatasi seminimal mungkin, sebab apa yang bisa dikerjakan oleh Pemerintah bisa dikerjakan oleh swasta memang betul-betul tidak bisa melakukannya secara efisien, misalnya dibidang pertahanan, hukum kepamongpraajaan, dan mungkin juga pendidikan. Dengan cirri ideologis seperti ini, kita bisa menerka bahwa dibidang ekonomi makropun mereka tidak menghendaki bahwa: Suatu perekonomian Laizzer faire mempunyai kemampuan untuk menghasilkan tingkat kegiatan (GDP) yang "full employment" secara otomatis. Pada suatu waktu tertentu GDP mungkin berada di bawah atau di atas tingkat full-employment, tetapi kemudian akan segera kembali ke tingkat full employment. Campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi dalam jangka pendek adalah tidak perlu.

1. Pasar Barang

Menurut kaum Klasik, di pasar barang tidak mungkin terjadi kelebihan produksi atau kekurangan produksi jangka panjang waktu yang lama. Kalau pada suatu saat ada kelebihan atau kekurangan produksi, maka mekanisme pasar akan secara otomatis mendorong kembali perekonomian tersebut pada posisi dimana tingkat produksi total masyarakat akan memenuhi kebutuhan total masyarakat akan memenuhi kebutuhan total masyarakat secara "tepat" (full employment level of activity). Pendapat semacam ini dilandasi oleh adanya kepercayaan dikalangan kaum Klasik bahwa di dunia yang nyata ini:

- a) Hukum Say (Say's Law) yang mengatakan bahwa "setiap barang yang diproduksi selalu ada yang membutuhkannya (supply creates its own demand) berlaku dan
- b) harga-harga dari hampir semua barang-barang dan jasa-jasa adalah fleksibel, yaitu bisa dengan mudah berubah (naik atau turun) sesuai dengan tarik-menarik antara penawarannya dan permintaannya.

Hukum Say mengatakan bahwa "supply creates its own demand" berdasarkan logika sebagai berikut:

Setiap proses produksi (dari suatu barang/jasa) mempunyai dua akibat:

- a) menghasilkan barang/jasa sebagai hasil produksi, dan

- b) memberikan penghasilan kepada pemilik faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut, yang jumlahnya senilai dengan nilai dari hasil produksi tersebut.

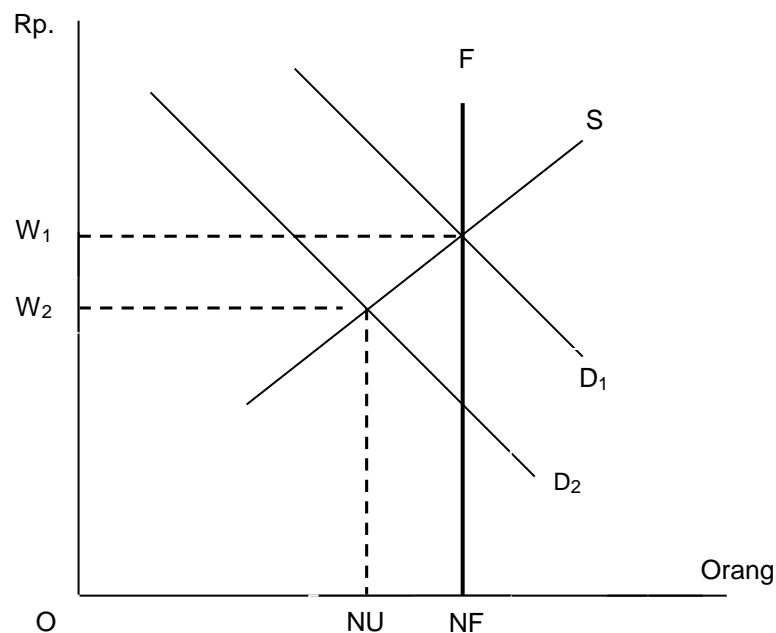
Jadi secara total di dalam suatu masyarakat pada suatu waktu selalu terdapat cukup penghasilan (daya beli, permintaan) untuk dibelanjakan pada hasil-hasil produksinya. Kekurangan permintaan akan hasil suatu barang tertentu masih bias terjadi, tetapi bahwa secara agregat (secara total) permintaan masyarakat tidak cukup untuk “membeli” hasil-hasil produksinya sendiri adalah, menurut Say, tidak masuk akal. Kelebihan produksi secara umum atau *general overproduction* adalah tidak mungkin. Dan selanjutnya, bila kita percaya (seperti halnya kaum klasik) bahwa harga-harga cukup fleksibel untuk menampung tarik-menarik permintaan dan penawaran, maka bila seandainya barang A yang telah diproduksi tidak bisa terjual (over produksi barang A), mekanisme harga akan mengakibatkan harga barang A turun, dan akan mengakibatkan, sesuai dengan hukum permintaan, kenaikan dari jumlah barang A yang diminta konsumen. Kalau harga barang A cukup fleksibel, maka harga tersebut akan turun sampai semua produksi barang A, dan tidak ada produksi dari barang-barang lainnya. Perekonomian sekali lagi ada pada posisi keseimbangan antara permintaan dan penawaran baik secara “makro” maupun secara “mikro” (*full employment*).

Jadi bagi suatu perekonomian (*laissez faire*) posisi di luar posisi keseimbangan selalu merupakan keadaan sementara saja. Posisi kesimbangan (*full employment*) inilah yang merupakan posisi yang “normal” bagi perekonomian tersebut.

Dari segi kebijaksanaan ekonomi ini berarti bahwa pemerintah tidak memerlukan campur tangan apapun. Kalau ada resesi atau defresi (turunnya GDP riil, mengakibatkan timbulnya pengangguran) dan kita hanya perlu menunggu saja sampai perekonomian tersebut melakukan proses penyesuaiannya, dan full employment pasti akan kembali. Pemerintah mungkin bisa mempercepat kembali “full employment” tersebut dengan mempermudah naik/turunnya harga-harga barang/jasa (yaitu membuat harga lebih fleksibel) dengan jalan menghilangkan rintangan-rintangan kelembagaan bagi perubahan harga-harga (misalnya, menghilangkan peraturan upah minimum, persekongkolan harga antara produsen dan sebagainya).

2. Pasar Tenaga Kerja

Kaum Klasik menganggap bahwa pasar tenaga kerja ini tiada beda dengan pasar-pasar barang lainnya. Bila harga dari tenaga kerja (yaitu, upah) juga cukup fleksibel maka permintaan akan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran akan tenaga kerja. Per definisi tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela. Artinya pada tingkat upah (riil) yang berlaku di pasar tenaga kerja semua orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan. Mereka yang menganggur, dengan demikian, hanyalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Jadi mereka ini adalah penganggur yang "sukarela". Gambar 1.4 berikut menunjukkan proses tersebut. Sumbu vertikal menunjukkan tingkat upah riil, sumbu horisontal menunjukkan jumlah orang yang bekerja di dalam suatu masyarakat.



Gambar 1.4

D₁ adalah kurva permintaan akan tenaga kerja (total dari kebutuhan oleh produsen-produsen dan pemerintah S adalah kurva penawaran tenaga kerja yang menunjukkan berapa orang yang bersedia bekerja pada berbagai tingkat upah riil. Kurva yang tegak F, menunjukkan jumlah angkatan kerja, yaitu semua orang yang "mampu" dan bersedia bekerja. Pada posisi ini perekonomian kita ada pada "full employment", dimana seluruh angkatan kerja yang bersedia bekerja dapat bekerja. Kalau pada suatu waktu produsen

mengurangi produksinya (karena misalnya barang-barangnya banyak yang belum laku, maka kurva permintaan akan tenaga kerja akan bergeser ke kiri menjadi, misalnya D_2 . Tingkat upah yang berlaku turun W_1 ke W_2 , dan jumlah orang yang bekerja turun dari NF ke NU . Menurut definisi kita NF dikurangi NU adalah jumlah orang yang tidak bekerja. Tetapi $(NF - NU)$ orang yang tidak bekerja ini bukan penganggur yang tidak sukarela.

Mereka menganggur karena tidak mau bekerja (pada tingkat upah yang baru yaitu W_2), artinya menganggur secara sukarela.

3. Pasar Uang

Di pasar uang permintaan akan uang bertemu dengan penawaran akan uang. Untuk tahap pembahasan sekarang ini kita akan menganggap bahwa penawaran akan uang, yaitu jumlah uang yang beredar, ditentukan oleh pemerintah dan (untuk uang giral. Lembaga keuangan sesuai dengan jumlah kebijaksanaan tertentu. Dengan kata lain, jumlah uang yang beredar (yaitu, kartal plus uang giral) ditentukan oleh kebijaksanaan moneter yang kebetulan dianut oleh Pemerintah-cum-Lembaga Keuangan.

Mengenai permintaan akan uang, kaum Klasik mempunyai suatu teori yang cukup terkenal, yang dinamakan Teori Kuantitas. Teori ini sekali lagi, adalah mengenai permintaan akan uang. Teori Kuantitas mengatakan bahwa masyarakat memerlukan uang tunai untuk keperluan transaksi tukar-menukar mereka (misalnya jual beli barang dan jasa). Uang dibutuhkan oleh masyarakat (disini termasuk rumah tangga maupun produsen-produsen) karena uang bisa mempermudah proses tukar-menukar anggota masyarakat tersebut, dan tidak karena sebab-sebab lain. Menurut kaum Klasik, karena uang tidak bisa menghasilkan apa-apa kecuali mempermudah transaksi, maka uang akan diminta oleh masyarakat sejumlah yang tidak lebih apa yang diharapkan untuk "membiayai" proses transaksi mereka. Jadi, semakin banyak transaksi yang dilakukan semakin uang tunai yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sekarang, menurut kaum Klasik, volume transaksi ini tergantung pada dua hal, yaitu: volume barang/jasa yang diproduksi oleh masyarakat (yang diukur dengan GDP riil GDP pada harga konstan) dan tingkat harga umum. Semakin besar GDP semakin banyak transaksi yang diharapkan untuk dilaksanakan oleh para anggota masyarakat. Dan semakin tinggi harga-harga barang, semakin besar uang yang dibutuhkan untuk menutup setiap transaksi.

Jadi, Penawaran akan uang M_s = ditentukan oleh kebijaksanaan moneter.
 Permintaan akan uang M_d = kPQ
 dimana, k = suatu konstanta; Q = GDP dengan harga konstan;
 P = tingkat harga umum (rata-rata).

Menurut kaum Klasik, k tidak berubah dalam jangka pendek, dan terutama sekali ditentukan oleh faktor-faktor kelembagaan, misalnya kebiasaan pembayaran gaji (bulanan, harian dan sebagainya). Jadi untuk teori makro jangka pendek, yang kita bahas dalam buku ini, k bisa dianggap sebagai suatu konstanta. Q atau GDP riil, seperti yang telah kita lihat di atas, ditentukan di pasar barang, dan tingkat Q yang "normal" adalah Q pada tingkat "full employment". Sehingga Q menurut teori Klasik ditentukan di luar pasar uang, dan dengan demikian bisa dianggap sebagai sesuatu yang mendekati suatu konstanta (ditentukan sebelumnya).

Mekanisme pasar akan menyamakan penawaran akan uang dengan permintaan akan uang. Sehingga:

$$M_s = M_d = kPQ$$

Persamaan ini bisa ditaksirkan sebagai berikut: kalau volume uang beredar (yaitu M_d) ditambah dengan, misalnya, 10%, maka tingkat harga umum (yaitu, P) akan naik dengan 10% pula, kecuali bila dan Q berubah (yang dalam jangka pendek memang tidak dianggap berubah). Dan kalau misalnya volume uang yang beredar naik dengan 10% setiap triwulan, maka tingkat harga umum akan naik pula sebesar 10% setiap triwulan, dan kita mengatakan bahwa laju inflasi adalah 10% setiap triwulan. Ini adalah esensi teori moneter Klasik yang paling sederhana. Memang ada variasi dari teori moneter Klasik ini.

Secara ringkas: pasar uang mempertemukan permintaan akan uang (teori Kuantitas) dan penawaran akan uang. Selanjutnya penawaran dan permintaan akan uang ini menentukan tingkat harga umum. Menurut kaum Klasik, di pasar uang ditentukanlah "nilai" dari uang, yaitu daya beli uang untuk dibelikan barang-barang (yang bisa diukur dengan harga-harga barang). Dalam bab berikutnya kita akan membicarakan teori moneter Keynes, yang mengatakan bahwa di pasar uang ditentukan "harga" dari uang (yaitu tingkat bunga), bukannya "nilai" dari uang (atau tingkat harga umum).

4. Pasar Luar Negeri

Di pasar luar negeripun kaum Klasik juga mempertahankan pandangan mereka mengenai dunia yang selalu bisa mengoreksi ketidakseimbangan secara otomatis. Esensi teori mereka di sektor luar negeri ini adalah bahwa suatu perekonomian nasional tak perlu merepotkan diri untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus, asal saja Pemerintahnya mau memulai salah satu dari sistem pembayaran luar negeri di bawah ini:

- a) Sistem Standar Emas, yaitu sistem dimana uang dalam negeri (misalnya, rupiah) dijamin penuh dengan emas. Artinya setiap satuan uang tersebut (misalnya, satu rupiah) selalu bisa ditukarkan dengan emas murni seberat x gram pada Bank Sentral.
- b) Standar Kertas dan Kurs Devisa yang fleksibel. Dalam sistem ini kita boleh mempunyai sistem keuangan dalam negeri yang mengikuti "standar kertas", yaitu menggunakan uang kertas yang tidak dijamin dengan emas (seperti uang rupiah kita sekarang), tetapi disamping itu kita juga menganut sistem kurs devisa yang "mengambang".

Arti "mengambang" ini adalah bahwa kita (atau pemerintah kita) tidak menentukan kurs atau paritas (perbandingan pertukaran) antara satu rupiah dengan, misalnya dollar, atau mata uang asing lainnya. Kurs rupiah terhadap mata uang asing manapun dibiarkan untuk naik turun secara bebas sesuai dengan tarik-menarik dan kekuatan-kekuatan pasar devisa. Asalkan semua saja negara memakai sistem standar emas maka setiap perekonomian nasional akan mempunyai suatu sistem neraca perdagangan yang bisa mengoreksi ketidakseimbangan secara otomatis.

Proses koreksi ini berjalan sebagai berikut. Bila misalnya negara kita (yang kita anggap memakai standar emas) mengalami defisit dalam neraca perdagangan, artinya kita mengimpor selalu banyak dibanding dengan penerimaan devisa dari ekspor kita, maka cadangan emas Bank Sentral akan menurun karena negara kita harus membayar (mengirim emas) kepada negara-negara lain sejumlah defisit neraca perdagangan tersebut. Ini berarti jumlah uang yang beredar di dalam negeri (MS) juga terpaksa harus dikurangi (ingat rupiahpun harus dijamin dengan emas secara penuh, sehingga berkurang emas berkurangnya rupiah yang bisa diedarkan di dalam negeri).

Akibat selanjutnya adalah turunnya harga barang, barang di dalam negeri (P turun), ini sesuai dengan teori Kuantitas. Selanjutnya ekspor kita naik karena harga barang-barang kita menjadi lebih murah bagi orang-orang luar negeri, dan bersamaan dengan itu impor kita turun karena harga barang-barang buatan dalam negeri menjadi relative lebih murah dari barang-barang impor. (Ingat, bahwa harga di dalam negeri telah turun dan harga di luar negeri justru cenderung untuk menaik karena bertambahnya uang emas yang beredar ke luar negeri). Proses ini dikenal sebagai mekanisme Hume, akhirnya membawa neraca perdagangan kita ke arah keseimbangan lagi

Bila kurs devisa yang mengambang yang kita pakai, proses penyeimbangan yang serupa di atas terjadi. Anggap pada suatu waktu jumlah uang yang beredar di dalam negeri adalah tertentu, misalnya sebesar Y milyar rupiah. Kalau kita mengalami defisit dalam neraca perdagangan, yaitu mengimpor terlalu banyak, maka cadangan devisa kita menurun. Ini berarti bahwa selanjutnya devisa yang tersedia (untuk impor) akan menjadi lebih kecil dibanding dengan permintaan akan devisa tersebut.

Akibatnya "harga" mata uang asing (yang dinyatakan dalam rupiah) naik, yang berarti bahwa kurs devisa akan berubah misalnya, dari Rp. 625,00 = 1 US katakan menjadi Rp. 800,00 = 1 US dollar. Akibat selanjutnya adalah impor kita menurun karena harga barang-barang impor mahal, dan ekspor kita akan naik karena eksportir terangsang dengan mendapatkan jumlah rupiah yang lebih besar untuk setiap dollar yang mereka terima dari luar negeri. Jadi neraca perdagangan pun menjadi seimbang kembali, tetapi pada kurs devisa yang berbeda.

B. BEBERAPA KOMENTAR MENGENAI TEORI KLASIK

Dalam teori Klasik terkandung keyakinan bahwa masing-masing pasar (baik pasar "makro" maupun pasar "mikro") yang bersama-sama membentuk suatu perekonomian memiliki daya mengatur diri sendiri (self-regulating) menuju keseimbangannya. Sistem ekonomi menurut kaum Klasik, adalah bagian dari "orde alamiah" (natural over) yang tunduk pada "hukum-hukum alam" (natural laws). Tindakan-tindakan manusia (berupa, misalnya kebijaksanaan-kebijaksanaan pengaturan oleh pemerintah) justru sering menghambat penyesuaian alamiah dari perekonomian kearah keseimbangan. Namun kebanyakan kaum Klasik akan menyetujui dua macam campur tangan Pemerintah di

bidang ekonomi (selain bidang pertahanan, hukum dan kepomongprajaan yang disebut di atas), yang satu pada tingkat “mikro” dan yang lain pada tingkat “makro”.

Campur-tangan pada tingkat mikro tersebut menyangkut pengaturan-pengaturan atas industri-industri yang bersifat monopoli dan penghapusan hambatan-hambatan kelembagaan yang menghalangi fleksibilitas harga-harga untuk turun atau naik sesuai dengan tarik-menarik penawaran dan permintaan pasar. Tindakan-tindakan seperti ini dianggap akan membantu proses penyesuaian alamiah tersebut di atas.

Campur-tangan yang kedua, yang menyangkut tingkat “makro” adalah tindakan pengaturan terhadap jumlah yang beredar (MS). Namun hal inipun hanya berlaku bagi negara-negara yang menganut standar kertas, dan bukan bagi mereka yang menggunakan standar emas. Kita lihat di atas bahwa tingkat harga umum (P) langsung ditentukan oleh besarnya uang yang beredar. Dalam sistem standar kertas, tugas utama dari Pemerintah adalah mengendalikan MS sehingga tercapai kestabilan tingkat harga umum (yaitu menjaga agar tidak timbul inflasi). MS harus dikendalikan agar dari waktu ke waktu meningkat sesuai dengan peningkatan kebutuhan uang untuk transaksi masyarakat, tidak lebih dan tidak kurang. Tugas pengendalian inflasi ini, menurut kaum Klasik, adalah satu-satunya tugas makro Pemerintah. Selebihnya dari itu, Pemerintah tidak perlu melakukan tindakan-tindakan makro lainnya. Perekonomian akan melakukan penyesuaian sendiri.

Bagaimana bila negara menganut sistem standar emas? Tugas makro Pemerintah bahkan lebih mudah lagi, yaitu tidak melakukan apa-apa. Mengapa demikian? Sebabnya adalah bahwa sistem standar emas adalah self-regulating. Dalam sistem ini jumlah uang yang beredar hanya bisa ditambah dengan jalan menaikkan produksi emas. Memproduksi (menambang) emas memerlukan biaya. Jumlah yang beredar tidak bisa ditambah menurut kehendak Pemerintah, tetapi secara otomatis dibatasi oleh adanya biaya untuk menambah “uang” tersebut. Tepatnya, karena emas mempunyai nilai instristik seperti barang-barang lain, maka para produsen emas (Pemerintah bukan satu-satunya produsen emas) akan memproduksi emas sampai sejumlah tertentu sehingga harga emas sama dengan biaya marginal untuk memproduksi emas. (Ingat dalil dari teori mikro bahwa produsen sesuatu akan berusaha menyamakan ongkos marginal dengan harga barang, agar bisa dicapai keuntungan maksimum). Bila harga emas tinggi (yaitu, bila

harga barang-barang lain adalah rendah bila dinyatakan dalam satuan emas) maka produsen emas akan cenderung menaikkan harga emasnya. Ini berarti bahwa jumlah uang yang beredar makin banyak, dan ini selanjutnya akan menurunkan harga emas (atau menaikkan harga barang-barang lain). Keadaan sebaliknya akan terjadi kalau harga emas terlalu rendah. Jadi di dalam sistem moneter standar emas, kestabilan harga-harga otomatis terjamin. Asal “aturan permainan” nya dipatuhi, sistem emas penjamin tidak timbulnya masalah inflasi. Dunia manakah yang ideal dari “dunia Klasik” tersebut?

C. TEORI KLASIK DAN REALITA SEJARAH

Liberalisme mempunyai andilnya dalam sejarah perkembangan perekonomian negara-negara Barat. Sekitar 150 tahun yang lalu perekonomian negara-negara Eropa lepas-landas (take-off) dengan sistem yang dijiwai oleh ideologi liberalisme. Selama lebih dari 100 tahun setelah revolusi industri yang dimulai di Inggris, GDP dari negara-negara ini mengalami pertumbuhan yang pesat dan harga-harga cukup stabil. Dari segi ini, teori Klasik dan standar emas menepati janjinya. Namun bila kita mendalami apa yang ada dibalik angka-angka makro ini, kita temui adanya dua segi dari perekonomian yang perkembangannya tidak seindah perkembangan GDP dan tingkat harga. Masalah-masalah yang timbul dari distribusi pendapatan dan kekayaan warga masyarakat yang semakin timpang telah mengundang reaksi yang keras dari golongan yang menyebut dirinya sebagai kaum Sosialis.

Segi yang kedua menyangkut masalah pengangguran dari fluktuasi GDP dari tahun ke tahun. Memang benar bahwa GDP negara-negara tersebut menunjukkan dengan jelas adanya trend pertumbuhan yang pesat. Namun kalau diteliti perkembangannya dari tahun ke tahun nampak jelas pula adanya masa-masa depresi yang parah selama kurun waktu 150 tahun tersebut di atas. Dari waktu ke waktu produksi menciut dan buruh dipecat dan menganggur, tidak jarang untuk waktu yang cukup lama. Depresi berat yang paling akhir yang melanda dunia terjadi pada tahun 1930-an. Di banyak negara pada waktu itu tingkat kegiatan nasional (yang diukur dengan GDP riil atau dengan harga konstan) anjlok menjadi hampir separuhnya hanya dalam waktu satu tahun saja.

Banyak pabrik-pabrik yang tutup dan dicitkan. Dan yang menyedihkan, banyak buruh-buruh yang dipecat dan menganggur. Banyak Pemerintah di negara-negara Barat pada waktu itu masih berpandangan “Klasik”. Mereka hampir tidak berbuat apa-apa,

dengan harapan dan keyakinan bahwa sistem bebas usaha mereka (*laissez faire*) akan mengoreksi diri sendiri. Ternyata koreksi otomatis tersebut tak kunjung datang, atau karena sangat lambat kerjanya, sedangkan para penganggur yang jumlahnya puluhan juta itu sudah mendekati kelaparan karena tidak berpenghasilan apapun. Beberapa Pemerintah kemudian memutuskan untuk melakukan campur-tangan yang lebih aktif. Di tengah-tengah persimpangan jalan sejarah di dunia Barat inilah teori Keynes lahir.

Ringkasan:

1. Teori makro Klasik mempunyai dasar filsafat bahwa perekonomian yang didasarkan pada system bebas-berusaha (*laissez faire*) adalah self-regulating, artinya mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi keseimbangannya secara otomatis. Oleh karena itu Pemerintah tidak perlu campur-tangan.
2. Di pasar barang self-regulating ini dicerminkan oleh adanya proses yang otomatis membawa kembali ke posisi GDP yang menjamin full employment, apabila karena sesuatu hal perekonomian tidak pada posisi ini. Landasan dari keyakinan ini adalah (a) berlakunya Hukum Say yang menyatakan bahwa: "Supply creates its own demand", dan (b) anggapan bahwa semua harga fleksibel.
3. Di pasar tenaga kerja, dalam jangka pendek hanya ada pengangguran sukarela. Tetapi pengangguran inipun hanya bersifat sementara, karena apabila harga-harga turun (termasuk tingkat upah), maka konsumsi dan produksi akan kembali lagi ke tingkat semula (yaitu tingkat full employment).
4. Di pasar uang, kaum Klasik mempunyai Teori Kuantitas, yang menyatakan bahwa permintaan akan uang adalah proporsional dengan nilai transaksi yang dilakukan masyarakat. Di pasar ini ditentukan tingkat harga umum; apabila jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat.
5. Dalam sistem standar kertas, tidak ada proses otomatis yang menstabilkan tingkat harga. Di sini kaum Klasik melihat satu-satunya peranan makro Pemerintah, yaitu mengendalikan nilai uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat.

6. Dalam sistem standar emas, ada mekanisme otomatis yang menjamin kestabilan harga. Di sini peranan Pemerintah tidak dianggap perlu, sebab jumlah uang (emas) yang beredar otomatis akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.
7. Di pasar luar negeri, mekanisme otomatis menjamin keseimbangan neraca perdagangan melalui:
 - a) Mekanisme Hume, dalam system standar emas, atau
 - b) Mekanisme kurs devisa mengambang, dalam sistem standar kertas, campur-tangan Pemerintah tidak diperlukan.

D. SOAL LATIHAN

1. Jelaskan latar belakang timbulnya teori klasik
2. Apa sumbangan pemikiran yang paling penting dari kaum klasik
3. Jelaskan mengenai Hukum Say
4. Menurut pendapat anda apakah Hukum Say dapat digunakan dalam kondisi sekarang
5. Apa kelemahan teori Klasik
6. Apa fungsi mekanisme kurs devisa mengambang
7. Jelaskan alasan kaum klasik yang mengatakan pasar tenaga kerja dalam jangka pendek hanya menimbulkan pengangguran sukarela
8. Mengapa dalam penggunaan standar uang kertas tidak ada proses otomatis menstabilkan harga
9. Mengapa dalam penggunaan system standar emas ada proses otomatis menstabilkan harga
10. Apa peranan pemerintah dalam teori klasik

DAFTAR REFERENSI

- Boediono, Ekonomi Makro, BPFE, Yogyakarta, 1983
- Gregory Mankiw, Teori Makro Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 2003
- Mulya Nasution, Teori Ekonomi Makro, Djambatan, Jakarta, 1997

KEGIATAN BELAJAR VI

EKONOMI BARU DARI J.M. KEYNES

Dengan terbitnya buku J.M. Keynes, terutama yang berjudul “The General Theory of Employment, Interest and Money” (1936), maka peninjauan masalah-masalah ekonomi mengalami perubahan besar bahkan bersifat fundamental, yaitu dari peninjauan yang bersifat mikro berubah menjadi peninjauan yang bersifat makro ekonomi. Semenjak perubahan besar dan fundamental itu, berkembanglah kemudian apa yang disebut dengan “Keynesian Economic”.

Akan tetapi tidaklah boleh dilupakan dengan faham dan teorinya yang baru itu, tidaklah berarti bahwa Keynes tidak terpengaruh sama sekali oleh faham ekonomi lama yang berkembang sebelum Keynes.

Pengertian-pengertian seperti Marginal Propensity to Save, Marginal Efficiency of Capital dan lain-lain, adalah pengertian-pengertian yang berasal dari ahli-ahli ekonomi Neo Klasik. Ekonomi Swedia (aliran Stockholm) seperti Bertil, Ohlin, Lindahl, Myrdall dan lain-lain, ikut secara aktif menyempurnakan faham ekonomi baru dari Keynes. Bilamana demikian maka benarlah apa yang dikatakan oleh Alexander Grey dalam bukunya “Development and Economics Doctrine” bahwa: Old doctrine never die, they only fade away. Lebih tegas lagi apa yang dikatakan oleh Marshall, yaitu bahwa teori ekonomi bukanlah..a body of irri du truth, but an engine for the discovery of irri du truth.

Disamping itu, agaknya benarlah bahwa bilamana diselidiki dan diperhatikan dengan seksama, maka berkembangnya suatu faham atau suatu teori, adalah didorong oleh suatu masalah yang dihadapi pada suatu masa, pada masa mana masyarakat menghendaki pemecahan dan penyelesaian masalah itu secara mendasar dan menyeluruh.

Teori Keynes apa yang dibentangkan dalam bukunya “The General Theory of Employment, Interest and Money” (1930), dalam keseluruhannya adalah merupakan penolakan total terhadap teori-teori ekonomi Klasik yang lama berkembang sebelum Keynes. Teori – teori ekonomi Klasik, seperti apa yang ditunjukkan oleh sejarah, gagal dalam mengatasi masalah ekonomi yaitu over produksi dan pengangguran yang hebat di tahun-tahun tiga puluhan (masa depresi besar 1929-1930).

Teori ekonomi dari J.M. Keynes dalam garis besarnya dapat disimpulkan dalam lima (5) ide-ide pokok, yaitu:

- a. Sifat umum dari Teori Keynes
- b. Peranan uang
- c. Hubungan antara tingkat bunga modal dan uang
- d. Peranan Investasi
- e. Ketidakpastian dari masa-masa yang akan datang

Setelah melihat pendahuluan diatas maka kami merumuskan Tujuan instruksional khusus (TIK), mahasiswa diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan gambaran sifat umum teori Keynes
- b. Menjelaskan peranan uang dalam ekonomi makro
- c. Menjelaskan dan menganalisa hubungan antara tingkat bunga modal dan uang
- d. Menjelaskan peranan Investasi dan tabungan dalam ekonomi makro
- e. Menjelaskan ketidak pastian dari masa yang akan datang
- f. Menjelaskan dan menganalisa system Keynes tentang politik ekonomi

A. SIFAT UMUM DARI TEORI KEYNES

Sesuai dengan nama bukunya, maka Keynes menekankan bahwa teorinya adalah bersifat umum (general). Dalam artian bahwa teori Keynes itu ditujukan untuk semua tingkat employment (kesempatan kerja). Tidak seperti ekonomi tradisional (Klasik) yang hanya berlaku dalam suatu tingkat (macam) employment, yaitu full employment.

Mengapa teori Klasik bersifat khusus, yaitu teori khusus untuk full employment, sebab para ahli-ahli ekonomi Klasik berpendapat bahwa dalam irri perekonomian yang didasarkan atas kebebasan pribadi (laissez faire), dalam perekonomian itu senantiasa ada tendensi full employment. Jelasnya full employment adalah normal menurut Klasik, sedangkan kurang dari full employment adalah normal menurut Keynes. Sebab itu teori Klasik adalah bersifat khusus (special) dan keseimbangannya adalah statis. Sebaliknya teori ekonomi dari Keynes adalah keseimbangan yang berubah-ubah (shitting equilibrium).

Dari sini jelaslah bahwa pangkalan atau dasar dari teori ekonomi Klasik dan teori ekonomi dari Keynes adalah berbeda, yaitu atas dasar full employment, dan kurang dari full employment. Oleh karena itu teori-teori yang dikembangkan atas dasar yang berbeda, dengan sendirinya pun tidak sama.

Segi lain dari Keynes yang bersifat umum ialah bahwa teori-teori Keynes tidaklah mempersoalkan sebuah perusahaan individu, atau suatu cabang perusahaan individu, atau representative firm (istilah Marshall). Tetapi yang dipersoalkan oleh teori – teori Keynes yang bersifat umum itu adalah persoalan-persoalan yang berkenaan dengan employment dan hasil atau pendapatan total dalam suatu sistem perekonomian sebagai suatu keseluruhan (totalitet).

Selanjutnya menurut Keynes, sesuai dengan dasar teorinya yang bersifat umum, maka Keynes berpendapat bahwa soal full employment dan un employment (pengangguran) ataupun persoalan inflasi dan pengangguran itu sebenarnya masalah permintaan efektif. Kurangnya permintaan efektif akan menimbulkan pengangguran dan sebaliknya jika berkelebihannya permintaan efektif akan menimbulkan gejala-gejala inflasi. Dari jurusan inilah, Keynes menghadapi masalah pengangguran yang dahsyat dan merajalela dalam tahun-tahun tiga puluhan.

Bilamana teori Keynes itu benar, maka teori ekonomi Klasik yang bersifat khusus (special theory) adalah salah. Bukan saja karena teori Klasik hanya berlaku dalam hal yang sangat terbatas, yaitu full employment, tetapi teori itu pun tidak atau kurang penting dalam dunia kenyataan dalam mana un employment nyata-nyata merupakan persoalan berat. Dan dengan teorinya yang baru itu Keynes bermaksud memecahkan realitet persoalan-persoalan ekonomi.

Teori Keynes bertujuan menjelaskan perubahan-perubahan employment dan output dalam suatu sistem perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Dasar konsepsi keseluruhan dari teori Keynes adalah jumlah employment, pendapatan dan produk nasional, konsumsi, tabungan dan investasi nasional.

P.A. Samuelson, terhadap ilmu ekonomi atau teori ekonomi, yang diciptakan sebelum J.M. Keynes menyebutnya dengan istilah Euclidean Economics, sedangkan untuk ilmu ekonomi yang dikembangkan oleh J.M. Keynes disebutnya dengan: Non Euclidean Economics.

B. PERANAN UANG

Bermula Keynes adalah seorang ahli ekonomi moneter seperti apa yang ditunjukkan dalam sebuah karyanya yaitu Treatise on Money yang mendahului kitabnya General Theory. Dalam analisa Keynes, uang mempunyai peranan penting dalam menentukan

luasan kesempatan kerja (employment) dalam masyarakat dan kegiatan produksi. Uang mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai alat penukar umum, sebagai suatu kesatuan hitung dan sebagai suatu alat untuk menghimpun kekayaan (store of value). Fungsi ketiga inilah terpenting dalam analisa Keynes.

Bagi mereka yang berpendapatan besar, artinya lebih besar dari pengeluaran konsumsinya, mereka dapat menyimpan kelebihan pendapatannya itu sebagai suatu saving (tabungan). Tabungan adalah kelebihan pendapatan di atas konsumsi. Tabungan tersebut dapat digunakan untuk:

1. Dipinjamkan kepada pihak lain, untuk ini mereka akan mendapatkan bunga (interest)
2. Disimpan dalam bentuk uang tunai (jadi tidak produktif – hoarding). Untuk itu ia tidak mendapatkan apa-apa.
3. Di investasikan, yaitu dipergunakan dalam proses produksi untuk tujuan mana ia akan mendapatkan yang lazimnya disebut Marginal Efficiency of Capital (MEC).

Berhubung dengan tiga kemungkinan saving tersebut, timbulah pertanyaan mengapakah seseorang itu melakukan hoarding, yaitu bentuk penggunaan saving seperti No. 2. Atas persoalan ini, maka Keynes memberikan jawaban bahwa uang tunai adalah bentuk yang paling aman untuk menghimpun kekayaan yang setiap waktu dapat saja dipergunakan. Dalam bentuk pertama dan ketiga (No. 1 dan 3 di atas) meskipun bagi mereka yang melakukan akan memperoleh pendapatan bunga atau MEC, namun keduanya itu senantiasa menghadapi ketidakpastian (uncertainty) dalam masa-masa mendatang.

C. MASALAH HOARDING

Hoarding adalah keinginan seseorang untuk menahan uang tunai (people desire to hold wealth in the form of money). Bilamana seseorang melakukan hoarding, berarti orang itu melepaskan pendapatan yang berupa bunga. Jelasnya seseorang akan menerima pendapatan yang berupa bunga, jika orang itu tidak melakukan hoarding adalah berbagai jumlah uang yang ingin seseorang pada berbagai tingkat bunga. Jadi hoarding itu tidak lain adalah permintaan akan uang (demand for money), dan Keynes menggunakan istilah Liquidity preference.

D. HUBUNGAN ANTARA TINGKAT BUNGA DENGAN UANG

Dalam analisa Keynes, bunga (interes) adalah suatu premi karena seseorang itu tidak menimbun uang (tidak melakukan hoarding atau mengorbankan liquidity preference-nya). Pendapatan demikian didasarkan atas: Bahwa keinginan seseorang untuk melakukan hoarding, meskipun itu yang paling aman adalah mutlak. Dalam arti bahwa seseorang akan bersedia melepaskan atau berpisah dengan uangnya bilamana orang itu mendapatkan bunga.

Pendapat Keynes yang demikian tentang bunga secara prinsipil adalah berbeda dengan pendapat para ahli ekonomi Klasik. Ahli-ahli ekonomi Klasik berpendapat bahwa bunga adalah sejumlah balas jasa karena menabung. Jadi bunga dalam pendapat ahli-ahli ekonomi Klasik adalah sama artinya dengan hadiah karena penundaan konsumsi. Sedangkan Keynes berpendapat bahwa bunga adalah balas jasa karena seseorang itu mengorbankan Liquidity preference-nya. Sesuai dengan pendapat Keynes, maka makin besar liquidity preference seseorang maka berarti makin besar keinginan orang untuk memiliki uang tunai, maka makin besarlah jumlah bunga yang harus dibayarkan atas jumlah uang yang dipinjamkan.

E. PERANAN INVESTASI

Dalam pandangan Keynes maka investasi mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai determinan employment atau pendapatan. Jelasnya, kesempatan kerja dalam suatu masyarakat bergantung pada jumlah investasi yang terlaksana terselenggarakan dalam masyarakat itu sendiri, dan kurangnya investasi akan menimbulkan pengangguran (un employment).

Dapatkah dinyatakan bahwa untuk memahami teori Keynes yang bersifat umum adalah terletak dalam jawaban atas pertanyaan: Apakah yang menyebabkan mengapa investasi mengalami fluktuasi (kegoncangan) sehingga investasi menjadi berkurang dari jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai tingkat full employment?

Investasi meliputi kegiatan berusaha di bidang-bidang jaringan-jaringan irigasi, transportasi, industri-industri dan lain-lain yang kesemuanya itu menghasilkan barang-barang/jasa-jasa yang akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat. Adanya investasi dalam masyarakat pertama-tama akan memberikan dan menambah kesempatan kerja, sehingga pendapatan masyarakat pun bertambah. Bertambahnya pendapatan akan memperbesar

konsumsi masyarakat, sehingga para pengusaha akan mendorong untuk memperbesar produksinya dengan memperluas perusahaannya, baik dengan menambah materialnya, tenaga kerja, dan demikianlah seterusnya bagi factor-faktor produksi yang lain.

F. KETIDAKPASTIAN MASA YANG AKAN DATANG

Irrasionalitet psychologis sebagai suatu sebab dari ketidakpastian. Pelaksanaan Investasi sebagai suatu determinan penting untuk employment dan pendapatan adalah berdasarkan dugaan-dugaan, perkiraan-perkiraan atau ramalan-ramalan (expectation) terhadap masa-masa yang akan datang yang senantiasa diliputi oleh ketidakpastian. Sebab itu, keputusan tentang investasi pada dirinya mengandung bahaya-bahaya dari ketidakpastian pada dirinya jelas meniadakan kemungkinan bahwa pengharapan dalam investasi dapat dilakukan secara tepat, rasional dan ilmiah. Tetapi meskipun demikian, sebagai manusia hidup dalam masyarakat yang produktivitet dan pendapatannya bergantung pada investasi, maka seharusnya bilamana kita membuat keputusan tentang masalah investasi untuk masa-masa mendatang, sekalipun kesemuanya itu bergantung pada ketidakpastian dan mudah berubah. Bagi mereka yang mengambil keputusan tentang investasi, boleh dikatakan tidak mempunyai kepercayaan atas penilaiannya sendiri. Mereka mengikuti gerak-gerik dan pendapat para pengusaha yang merefleksikan dalam pasar.

Jadi conventional judgment menurut Keynes adalah merupakan dasar bagi para investor yang hendak menginvestir modalnya. Dalam perekonomian, dimana masa depan perekonomian merupakan sesuatu bentuk penting untuk menimbun kekayaan (store of wealth), maka tingkat umum dari employment adalah bergantung pada hubungan antara untung (pendapatan dari employment) dari investasi dengan tingkat bunga yang harus dibayar guna mendorong para pemilik modal agar supaya bersedia meminjamkan uangnya.

Bilamana terdapat kepercayaan positif tentang masa depan, maka investasi riil akan meningkat dan employment pun akan meluas. Dalam hal sebaliknya, employment akan berkurang dan harapan untuk mendapatkan laba pun berkurang. Depresi akan terjadi bilamana jumlah bunga yang luas dibayar kepada mereka yang memberikan pinjaman modal melebihi jumlah pendapatan (MEI) yang diharapkan dari investasi.

Ke dalam lima ide pokok tersebut di atas itulah, garis besar teori Keynes ini disimpulkan. Dengan memperhatikan kelima ide pokok tersebut, jelas bahwa kelima pokok itu merupakan suatu kebulatan teori, sehingga satu sama lain adalah keterkaitan yang kait mengait dan oleh karena ia tidak menahan kekayaannya dalam bentuk uang. Kelima ide pokok tersebut boleh juga dikatakan sebagai suatu teori tentang investasi dan akibat-akibat dari fluktuasi dalam investasi. Fluktuasi dalam investasi dan akibat-akibat dari fluktuasi dalam investasi. Fluktuasi dalam investasi akan menyebabkan fluktuasi (kegoncangan) dalam employment dan pendapatan.

Fluktuasi investasi secara luas ditentukan oleh fluktuasi dan sifat tidak pasti dari pengharapan akan pendapatan (marginal efficiency of investment) dimasa mendatang dari aktiva modal mana investasi itu ditanamkan. Investasi akan terjadi bilamana pengharapan atas pendapatan dalam masa-masa mendatang lebih besar daripada premi yang harus dibayar kepada mereka yang telah meminjamkan uangnya untuk keperluan investasi tersebut.

G. AZAS PERMINTAAN EFEKTIF

Azas (prinsip) permintaan efektif, yaitu azas yang bertenaga beli, adalah merupakan titik tolak (starting point) dari teori Keynes yang bersifat umum tentang employment. Menurut teori Keynes tingginya tingkat employment atau luasnya kesempatan kerja yang tersedia dalam masyarakat, bergantung pada besarnya permintaan efektif dari masyarakat itu sendiri. Timbulnya pengangguran (un employment) dalam suatu masyarakat disebabkan oleh kurangnya permintaan efektif itu.

Dengan azas teori permintaan efektif ini, maka dalam menghadapi masalah perekonomian masyarakat, Keynes meletakkan tekanan utamanya pada segi permintaan dan tidak pada segi penawaran seperti para ahli-ahli ekonomi Klasik yang berdasarkan dari pada irri pasar dari Say.

Pengertian permintaan sepanjang teori Keynes, adalah permintaan total (aggregate demand) dari suatu masyarakat sebagai suatu keseluruhan dan bukannya permintaan irri dual seperti permintaan, dan bukan permintaan suatu perusahaan/cabang perusahaan. Demikian pula dalam hal penawaran, penawaran dalam teori Keynes adalah penawaran total (aggregate supply) dan bukannya penawaran riil dual seperti yang lazimnya didapati pada mikro ekonomi. Berapa besarnya permintaan dan penawaran total tidaklah diukur

dengan kilogram, ton, yards dan sebagainya, seperti yang terjadi pada kurve penawaran dan permintaan dalam makro ekonomi, tetapi diukur dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dalam masyarakat.

Atas dasar ukuran ini maka harga permintaan total adalah sejumlah penerimaan uang (proceed) yang diharapkan dari penjualan hasil produksi yang dapat dihasilkan oleh jumlah seluruh tenaga kerja dari suatu masyarakat. Demikian pula penawaran total adalah jumlah penawaran atas seluruh hasil produksi (out put) inilah yang menentukan harga dari jumlah seluruh hasil produksi (out put) inilah yang menentukan harga dari penawaran total. Kesamaan antara penawaran total dengan permintaan total inilah yang menentukan besarnya permintaan efektif dan luasnya kesempatan kerja dalam masyarakat.

H. SISTEM J.M. KEYNES TENTANG POLITIK EKONOMI

J.M. Keynes (1883-1946) adalah putera seorang professor ekonomi Inggris yang terkenal yang memberi kuliah pada universitas Cambridge.

Approach ekonomi Keynes adalah jelas berbeda dari ekonomi kaum klasik. Teori ekonomi klasik adalah berdasarkan atas berlakunya system harga dan efisiensi usaha ekonomi swasta (private interprese). Dalam faham ekonomi klasik harga itu dipandang sebagai "The insible hand" (tangan yang tidak tampak), yang mengatur proses bekerjanya ekonomi yang sedemikian rupa, sehingga keperluan konsumen dapat terpenuhi secara optimal. Keperluan dan kebutuhan masyarakat menurut ahli-ahli ekonomi klasik, dan melalui mekanisme pembentukan harga (price merchanism), yaitu tarik menariknya permintaan dan penawaran dipasar arah dan irama produksi akan ditentukan. Selanjutnya menurut teori ekonomi klasik, kehidupan ekonomi akan mencapai optimumnya bilamana pemerintah tidak campur tangan dalam perekonomian, dan berikan sajalah kebebasan bertindak dan bersaing pada swasta seluas-luasnya (*laissez faire, laissez aller, laissez passer*).

Menurut Keynes, maka letak masalah ekonomis itu adalah terletak diluar masalah harga. Kemakmuran menurut teori ekonomi adalah terletak atau ditentukan oleh tingginya pendapatan nasional suatu bangsa. Masalah-masalah lain seperti deflasi, inflasi, perpajakan, neraca pembayaran internasional adalah masalah-masalah yang besar pengaruhnya terhadap masyarakat, oleh karena itu teori ekonomi Keynes yang bersifat makro adalah berpusat pada teori dan ajaran pendapatn nasional.

EKONOMI MAKRO

Dalam menyusun dan mengembangkan teorinya Keynes menyatakan bahwa konsumsi adalah satu factor penting yang menentukan produksi masyarakat, dan bukanlah sebaliknya dalam teori ekonomi klasik yang mendasarkan diri dalam hukum say. Oleh karena itulah propensity to consume, oleh Keynes dijadikan suatu variable yang independent. Jelasnya konsumsi menimbulkan permintaan dan penawaran mendorong timbulnya investasi.

Selanjutnya konsumsi dan investasi secara bersama-sama merupakan permintaan efektif. Konsumsi bergantung pada pendapatan dan kecenderungan untuk konsumsi (propensity to consume), konsumsi dalam artian ini adalah sejumlah pengeluaran untuk membeli barang-barang konsumsi, jadi ekuivalen dengan permintaan. Analog dengan pengertian demikian, adalah dapat dipahami mengapa dalam teori Keynes tentang konjunktur (business cycle) mengemukakan teorinya tentang "konsumsi kurang" (under consumption).

Bagaimana dengan peranan pemerintah, yaitu intervensi pemerintah dalam perekonomian. Menurut Keynes intervensi pemerintah adalah sangat diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan kondisi-kondisi tertentu dalam perekonomian. Tentang arti pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian sepanjang teori Keynes adalah mirip dengan ide kaum Merkantilis.

I. PERANAN TABUNGAN (SAVING)

Dari keseluruhan teori keyens, dapat dipahami apa yang hendak dicapai, ialah kehidupan dan kegiatan perekonomian pada tingkat kegiatan ekonomi yang penuh (full employment), dalam tingkat mana semua peralatan produksi berada dalam penggunaan yang paling menguntungkan. Dalam system ekonomi Keynes ini terdapat ciri-ciri khusus yaitu:

1. Bersifat Makro ekonomi
2. Ekonomi moneter
3. Ekonomi tentang arus lingkaran (*circular flow*)

Dari ciri yang pertama, sifat teori ekonomi Keynes yang bersifat makro ekonomi nampak jelas variable yang digunakan, yang bersifat keseluruhan (totality agregatif), seperti konsumsi total, investasi dan tabungan total (nasional) dan sebagainya. Jadi

variablenya tidak bersifat individual seperti ciptaan ekonomi mikro dari teori ekonomi klasik.

Dari ciri yang kedua, besarnya variable yang sifatnya agregatif itu oleh teori Keynes ditegaskan besarnya, yaitu harus dinyatakan dengan uang. Uang dan jumlah uang merupakan alat penting bagi Bank sentral untuk melakukan aktivitas-aktivitas keuangan itu pulalah maka permintaan efektif dapat diperbesar.

Dari ciri ketiga, dalam teori Keynes ialah bahwa proses kegiatan itu digambarkannya sebagai suatu lingkaran (circular flow of economics). Dalam system lingkaran ini, maka pemerintah mempunyai fungsi untuk:

1. Mengusahakan agar supayapengeluaran masyarakat itu sama besarnya dengan pendapatan masyarakat sebab apa yang dikeluarkan oleh sebagian warga masyarakat, adalah pendapatan bagi pendapatan masyarakat lainnya.
2. Mengusahakan agar supaya pengeluaran atas pendapatan itu adalah menjadi cukup besar, sehingga dapat dicapai full employment. Disinilah betapa pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian, tidak seperti pada ekonomi klasik, teori klasik yang tidak menghendaki campur tangan pemerintah dalam proses kehidupan ekonomi.

Ciri lain dalam teori ekonomi Keynes ialah bahwa system itu tidak mengenal waktu. Ini berarti bahwa menurut Keynes, maka penyesuaian-penyesuaian yang dipersoalkannya itu terjadi tanpa tenggang waktu, tetapi terjadi dengan segera. Misalnya bahwa pendapatan total sama dengan pengeluaran total ($C = I$) pada waktu kini.

J. KOMENTAR TERHADAP TEORI EKONOMI KEYNES

Adapun ada beberapa komentar terhadap beberapa bahasan yang dikemukakan di atas, antara lain ialah:

1. Analisa Keynes ini terpusat pada tujuan mencapai kegiatan ekonomi full employment. Oleh karena menekankan pentingnya uang dalam perekonomian, maka tingkat full employment yang ingin dicapainya itu diusahakan melalui full employmentnya dana-dana (funds)
2. Selanjutnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka teori dan analisa Keynes ini merupakan jalur pemikiran dan skema untuk mencapai sejumlah arus dana-dana moneter yang mengalir secara kontiyu sepanjang waktu sehingga terjadilah arus

pengeluaran yang penuh (full Spending). Secara sederhana maka skema itu adalah bahwa pendapatan = pengeluaran = nilai output = harga-harga yang dibayarkan.

3. Besarnya pengeluaran itu dapat tersalur menjadi pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi, sehingga konsumsi ditambah investasi = pendapatan ($C + I = Y$).
4. Konsumsi adalah determinan pendapatan. Sebab itu persoalan penting dalam usaha pencapaian full employment, adalah bagaimana memperbesar investasi masyarakat, dan mencari jawaban atas masalah, mengapakah, factor-faktor manakah yang menyebabkan, mengapakah pengeluaran untuk investasi itu berkurang.
5. Tabungan (saving) oleh Keynes diartikan sebagai hal yang negative yaitu tidak digunakan untuk konsumsi (pengeluaran pendapatan sekarang).
6. Sumbangsih peranan Keynes dalam perkembangan ilmu ekonomi adalah jelas sekali, yaitu terlihat dari pengaruh yang demikian luasnya. Idenya yang paling menarik adalah dalam hal eficiency marginal modal (MEC) dan prefensi likwidited dalam persoalan bunga (interest of money).

K. KRITIK-KRITIK TERHADAP TEORI KEYNES

1. Teori bersifat statis, oleh karena Keynes tidak mempersoalkan masalah waktu dalam perumusan $Y = C + I$ dan $Y = C + S$, yang mengakibatkan $I = S$, menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh sekarang, juga dikeluarkan sekarang sedangkan kenyataannya tidak demikian. Pendapatan yang baru diperoleh sekarang, mungkin baru besok lusa dipergunakan, sehingga ada tenggang waktu antara pendapatan dan pengeluaran.
2. Macam-macam kecenderungan sebenarnya merupakan konsepsi-konsepsi lama, pengertian itu tidaklah baru.
3. Terlampau menyangkal adanya hubungan antara upah dan kesempatan kerja.
4. Rendahnya tingkat suku bunga tidak bisa diharapkan sebagai suatu factor stimulant untuk investasi dan employment.
5. Presensi likwiditas tidak cukup penuh sebagai suatu teori bunga.
6. Variabel-variabel yang diandalkan oleh Keynes adalah bersifat independent.
7. Idealismenya adalah sangat extreme

L. ARTI DARI TEORI EKONOMI KEYNES

Dalam garis besarnya ada 3 arti penting yang diberikan oleh Keynes, terhadap masalah-masalah ekonomi pada umumnya, yaitu:

1. Keynes telah menciptakan metode baru dalam mempelajari dan menganalisis kehidupan perekonomian, terutama tentang masalah pendapatan nasional. Yaitu metode $C + I = Y$ yang ternyata banyak manfaatnya untuk memecahkan masalah ekonomi baru. Masalah ekonomi mana masih merupakan masalah yang gelap bagi teori ekonomi lama (tradisional dan klasik).
2. Ekonomi baru yang menggunakan dasar analisa kerjanya pada lingkaran kegiatan ekonomi (circular flow of economic), maka peranan $C + I$, atas pendapatan nasional menjadi semakin besar dan mantap. Menurut teori ekonomi Keynes kehidupan perekonomian sangat dipengaruhi situasi $C + I$. Kegoncangan antara $C + I$ dapat mengakibatkan timbulnya defresi, inflasi maupun kestabilan. Bahaya-bahaya yang selalu mengancam dan mengoncang kestabilan ekonomi dan kemudian daya upaya untuk melunakkan atau menghilangkan kegoncangan-kegoncangan perekonomian itu, telah lebih banyak diketahui setelah mengembangkan konsep $C + I$ tersebut daripada sebelumnya.
3. Teori ekonomi Keynes sampai beberapa jauh dapat dipergunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan guna mencapai pertumbuhan dan perekonomian yang stabil, dalam tingkat yang tinggi.

M. SOAL LATIHAN

1. Apa ide dasar pemikiran J.M. Keynes
2. Apakah teori hubungan antara tingkat bunga modal dan uang masih berlaku pada saat ini
3. jelaskan alasan Keynes mengenai ketidak pastian masa yang akan datang
4. Jelaskan system Keynes tentang politik ekonomi
5. Apa sumbangan terbesar dari pemikiran Keynes untuk ekonomi saat ini
6. Jelaskan secara singkat analisa kerja pada lingkaran kegiatan ekonomi (Circular flow of economic)

7. Apa alasan Keynes menggunakan instrument C dan I dalam melakukan analisa ekonomi makro
8. Mengapa pengkritik Keynes mengatakan bahwa ia terlampau mengabaikan upah dan kesempatan kerja
9. Mengapa Keynes mengatakan tabungan sebagai hal yang negative
10. Jelaskan secara singkat tiga cirri dalam teori Keynes

DAFTAR REFERENSI

Boediono, Ekonomi Makro, BPFE, Yogyakarta, 1983

Gregory Mankiw, Teori Makro Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 2003

Mulya Nasution, Teori Ekonomi Makro, Djambatan, Jakarta, 1997

KEGIATAN BELAJAR VII

PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

Dalam suatu negara sangat diperlukan adanya perhitungan pendapatan nasional, hal ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemajuan perekonomian dibanding tahun lalu, sektor apa saja yang mengalami peningkatan dan penurunan kemudian dianalisa, dari hasil analisa tadi pemerintah dapat mengambil suatu keputusan tentang perencanaan baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Hal yang dibahas dalam bab ini meliputi jenis-jenis perhitungan pendapatan nasional, kegunaan pendapatan nasional, analisa pendapatan nasional, perhitungan pendapatan nasional Indonesia, serta hasil analisisnya.

Dan untuk mengarahkan proses pembelajaran diperlukan adanya Tujuan Instruksional khusus (TIK), mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan jenis-jenis perhitungan pendapatan nasional
2. Menjelaskan kegunaan pendapatan nasional
3. Menghitung dan menganalisa pendapatan nasional Indonesia

A. PENGUKURAN PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan nasional sebagai suatu pengertian dapat dipandang dari beberapa segi antara lain:

1. Pendapatan nasional berupa uang (earning)
2. Pendapatan nasional nyata (Riil)

Pendapatan nasional berupa uang dinyatakan berupa uang daripada barang-barang yang dikonsumsi pada tahun bersangkutan ditambah dengan investasi netto yang dilakukan pada tahun tersebut. Dengan demikian pendapatan nasional berupa uang, dinyatakan dalam kesatuan uang perkesatuan waktu.

Pendapatan nasional nyata merupakan suatu arus benda (flow of goods). Pendapatan tersebut meliputi jumlah kesatuan fisik produk, yang pada tahun bersangkutan dihasilkan dalam perekonomian untuk tujuan konsumsi dan investasi netto. Antara pendapatan nasional berupa uang dan pendapatan nasional nyata terdapat hubungan sebagai berikut:

Pendapatan nasional nyata = Pendapatan nasional berupa uang pertingkat harga umum

1. Faktor-faktor dalam negeri yang mempengaruhi pendapatan nasional:
 - a. Jumlah serta kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia.
 - b. Tingkat pembagian kerja.
 - c. Besarnya perusahaan-perusahaan
 - d. Metode produksi yang digunakan.
 - e. Pengetahuan ilmiah yang dimiliki oleh penduduk.
2. Lima konsep pendapatan dipandang secara makro
 - a. GNP (Gross National Product) = Produk Nasional Bruto.
 - b. NNP (Net National Product) = Produk Nasional Netto.
 - c. NI (National Income) = Pendapatan Nasional
 - d. Personal income = Pendapatan Perorangan Bruto
 - e. Disposable Income = Pendapatan siap dibawa pulang untuk dikonsumsi.

Keterangan:

1. Gross National Product (GNP) adalah Produksi total suatu Negara atau output barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), yang dihasilkan oleh suatu Negara, yang dinilai menurut harga pasar.
Tiga komponen GNP menunjukkan:
 - a. Barang dan jasa yang dikonsumsi yang dihasilkan guna pembelian pihak swasta (C).
 - b. Barang-barang investasi yang dihasilkan guna pembelian pihak swasta (I).
 - c. Konsumsi kedua jenis diatas, yang dihasilkan guna pembelian pemerintah dalam perekonomian yang bersangkutan. (G).
2. Net National Product (NNP) adalah nilai sebuah barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu, setelah dikurangi penyusutan untuk barang-barang modal.
3. National Income (NI) adalah pendapatan aggregate daripada tenaga kerja dan hak milik yang timbul daripada produksi yang berlangsung (Current Production) barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian.

4. Personal Income (PPN), personal income mengandung upah dan gaji, yang terdiri dari pendapatan hak milik serta sewa tanah, deviden dan bunga modal serta pendapatan transfer.
5. Disposable Income (Yd) adalah sisa personal income setelah dikurangi pajak pendapatan perorangan dan ditambah dengan transfer atau dapat dikatakan pendapatan masyarakat yang dapat dibawa pulang yang akan dipergunakan untuk konsumsi dan saving.

Sehingga dari No. 5 dapat dinyatakan bahwa:

NI - Pajak netto = Pendapatan Disposable dimana

Pajak Netto = Pajak langsung - Pembayaran Transfer (Tr)

Pajak langsung adalah merupakan jenis pajak yang langsung dipungut dari wajib pajak dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain, misalnya pajak pendapatan.

Pajak tidak langsung adalah merupakan jenis pajak yang dipungut dari wajib pajak biasanya dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya pajak pertambahan nilai (PPH), pajak penjualan barang mewah dan sebagainya.

B. JENIS-JENIS PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

Sebelum sampai pada perhitungan pendapatan nasional, terlebih dahulu perlu diketahui pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan aktivitas perekonomian secara makro. Pelaku ekonomi dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Rumah Tangga Sebagai Konsumen

Kelompok rumah tangga ini melakukan kegiatan pokok berupa:

- a. Menerima penghasilan dari produsen berupa upah tenaga kerja, sewa rumah dan sewa tanah.
- b. Menerima bunga atas simpanan di bank.
- c. Membelanjakan penghasilan di pasar barang dan jasa.
- d. Membayar pajak pada pemerintah

2. Produsen

Kelompok produsen melakukan kegiatan pokok, berupa:

- a. Memproduksi dan menjual barang
- b. Menggunakan faktor produksi yang dimiliki masyarakat
- c. Meminta kredit dari lembaga keuangan untuk investasi

- d. Membayar pajak usaha pada pemerintah
- 3. Lembaga Keuangan
 - Lembaga Keuangan ini melakukan kegiatan, berupa:
 - a. Menerima tabungan masyarakat
 - b. Menyalurkan kredit untuk investasi produsen
 - c. Membayar bunga simpanan masyarakat
- 4. Pemerintah
 - Pemerintah melakukan kegiatan pokok, berupa:
 - a. Menarik pajak langsung maupun pajak tak langsung
 - b. Membelanjakan penerimaan negara untuk konsumsi barang dan jasa kebutuhan pemerintah.
 - c. Mengadakan pinjaman ke luar negeri
 - d. Mencetak kebutuhan uang giral
- 5. Negara Lain
 - Negara lain melakukan kegiatan, berupa:
 - a. Menyediakan kebutuhan barang impor
 - b. Membeli barang-barang ekspor
 - c. Menyediakan kredit bagi pemerintah dan swasta dalam negeri.
 - d. Penghubung pasar uang dalam negeri dengan luar negeri.

Konsep terpenting dari perkembangan teori ekonomi Keynes adalah, perhitungan produk nasional bruto atau produk domestik bruto (PDB) yang merupakan nilai seluruh produksi atau *output* suatu negara. *Gross National Product* (GNP) atau PDB ini merupakan ukuran prestasi ekonomi dari seluruh sektor ekonomi negara tersebut.

Konsep pendapatan nasional merupakan persiapan yang sangat pokok untuk menangani permasalahan ekonomi, yaitu masalah pengangguran, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memanfaatkan perhitungan *output* secara nasional akan mendapatkan besarnya ukuran perekonomian yang tersembunyi (mungkin dikembangkan). Walaupun masa sekarang ini terdapat suatu kecenderungan khususnya bagi negara berkembang dalam mengejar pertumbuhan dengan mengorbankan kualitas hidup dan lingkungan. Berdasarkan kenyataan hal ini perlu didobrak cara perhitungan lama dan menemukan cara

untuk memperbaiki serta mengubah konsep PDB atau GNP menjadi tolak ukur yang lebih baik.

Kegunaan PDB atau GNP bagi suatu negara adalah:

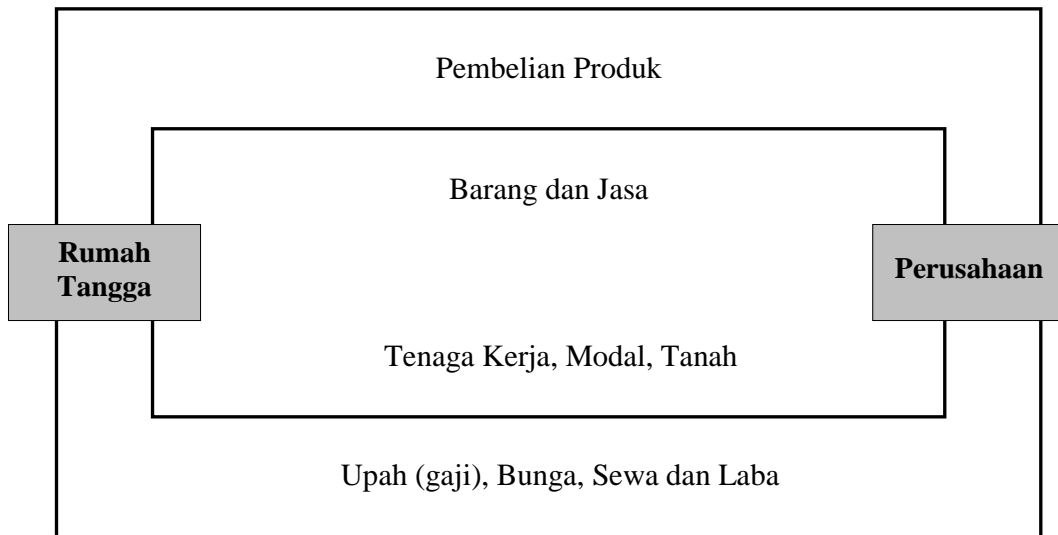
- a. Pendapatan nasional merupakan alat ukur bagi tinggi rendahnya tingkat kemakmuran suatu negara, yaitu income per capita (PDB atau GNP dibagi jumlah penduduk).
- b. Mengetahui struktur perekonomian negara yang bersangkutan, apakah negara agraris atau industri. Peranan masing-masing sektor memberikan kontribusi terhadap PDB atau GNP.
- c. Menentukan dan menyusun berbagai kebijakan lebih lanjut, misalnya sektor pertanian yang telah swasembada beras 1984, kemudian dapat disusun sektor penunjang pertanian agar swasembada tetap dipertahankan.
- d. Konsumsi, pengeluaran masyarakat atau pemerintah, tabungan investasi, dan pendapatan nasional merupakan landasan untuk menyusun perencanaan ekonomi untuk masa mendatang.
- e. Membandingkan kegiatan ekonomi masyarakat, swasta dan pemerintah dari tahun ke tahun.

Secara singkat produk nasional bruto adalah angka yang diperoleh dari penjumlahan seluruh nilai uang hasil pertanian, industri, sektor jasa, dan berbagai aktivitas lainnya dalam masyarakat dengan memanfaatkan tanah, tenaga kerja, modal, dan ilmu pengetahuan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah nilai uang seluruh pengeluaran untuk barang konsumsi, industri, dan kebutuhan pemerintah. Perhitungan pendapatan nasional bertolak dari perputaran arus barang dan jasa ke konsumen di satu pihak, dan perputaran arus pendapatan ke produsen, seperti gambar (2) di bawah ini:

Perhitungan pendapatan nasional merupakan catatan tentang kegiatan ekonomi yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian suatu masyarakat atau negara dalam kurun waktu tertentu. GNP atau PDB terdapat kelemahan-kelemahan, yaitu:

- a. Kurang lengkapnya data statistik dari berbagai sektor ekonomi yang melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak tercatat dalam perhitungan PDB atau GNP yang sebenarnya.

- b. Adanya atau timbulnya perhitungan ganda dari berbagai sektor industri, sehingga akan memperbesar GNP atau PDB dari yang sebenarnya.
- c. Sangat sukar membedakan secara nyata antara barang akhir dengan barang setengah jadi.



G

Gambar 2
Arus Perputaran Barang

Dalam perhitungan pendapatan nasional diketahui beberapa metode, yaitu:

1) Metode Pendapatan

Metode ini merupakan suatu perhitungan pendapatan nasional dengan memperhitungkan jumlah pendapatan seluruh masyarakat yang berasal dari penggunaan faktor-faktor produksi.

Untuk dapat melaksanakan proses produksi dalam masyarakat diperlukan berbagai faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan keahlian kewiraswastaan. Faktor produksi yang dipergunakan dalam proses produksi diberikan balas jasa atas faktor produksi tersebut, berupa sewa, bunga modal, upah dan gaji serta keuntungan. Semua balas jasa ini akan menjadi pendapatan. Perhitungan balas jasa inilah yang disebut sebagai metode pendapatan dalam perhitungan pendapatan nasional.

2) Metode Pengeluaran

Berdasarkan metode perhitungan pengeluaran ini dilakukan dengan menghitung seluruh pengeluaran masyarakat dalam suatu negara. Adapun pengeluaran yang dilakukan masyarakat adalah:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan perusahaan.
- b. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah berupa anggaran dan subsidi.
- c. Pengeluaran untuk investasi berupa barang modal tahan lama.
- d. Dikurangi dengan investasi asing bila ada.
- e. Ekspor dikurangi impor.

3) Metode Produksi

Dengan metode produksi, pendapatan nasional dapat diperoleh dengan mengalikan seluruh jumlah produksi yang dihasilkan sektor industri, sektor per orang, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Dengan masing-masing tingkat harga sektor tersebut, kemudian kita jumlahkan seluruhnya, atau dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai tambah (value added) dari semua sektor ekonomi. Dalam metode produksi ini perlu dihindari perhitungan ganda, agar jangan sampai diperoleh pendapatan nasional yang terlalu tinggi dari yang sebenarnya.

PRODUK DOMESTIK BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (miliar Rp.)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1210955.50	1258375.70	1307253.00
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	936356.90	970262.90	1005655.00
a. Tanaman Pangan	287216.50	293858.00	298027.30
b. Tanaman Hortikultura	130832.30	135649.00	145131.20
c. Tanaman Perkebunan	357137.70	373194.20	387496.70
d. Peternakan	143036.50	148688.80	155539.90
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	18133.90	18872.90	19459.90
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	60002.00	61279.60	62981.80
3. Perikanan	214596.60	226833.20	238616.20
B. Pertambangan dan	774593.10	779678.40	796505.00

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018
Penggalian			
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	313743.90	302653.00	298420.10
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	223098.60	226478.90	235561.40
3. Pertambangan Bijih Logam	89303.20	95150.40	103719.40
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	148447.40	155396.10	158804.10
C. Industri Pengolahan	2016876.90	2103466.10	2193368.40
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	220392.10	219849.40	219831.80
2. Industri Pengolahan Non Migas	1796484.80	1883616.70	1973536.60
3. Industri Makanan dan Minuman	585786.30	639834.40	690462.50
4. Industri Pengolahan Tembakau	85119.70	84572.40	87548.70
5. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	111978.20	116261.60	126406.80
6. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	25875.30	26449.00	28941.70
7. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	61790.60	61870.40	62337.30
8. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	72399.90	72640.60	73681.60
9. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	174469.80	182380.20	179791.90
10. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	69940.90	71666.80	76627.80
11. Industri Barang Galian bukan Logam	70118.70	69512.90	71424.40
12. Industri Logam Dasar	77293.00	81832.60	89188.60
13. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	200860.90	206469.30	205216.80

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018
14. industri Mesin dan Perlengkapan	29676.60	31325.00	34297.30
15. Industri Alat Angkutan	190523.40	197527.90	205907.20
16. Industri Furnitur	24489.80	25383.70	25946.00
17. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	16161.70	15889.90	15758.00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	100009.90	101551.30	107108.60
1. Ketenagalistrikan	86580.30	88663.40	93318.00
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	13429.60	12887.90	13790.60
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7634.60	7985.30	8429.40
F. Konstruksi	925040.30	987924.90	1048082.80
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1255760.80	1311746.50	1376878.70
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	239089.30	250442.60	262578.50
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1016671.50	1061303.90	1114300.20
H. Transportasi dan Pergudangan	374843.40	406679.40	435336.50
1. Angkutan Rel	3050.60	3630.20	4020.00
2. Angkutan Darat	206218.10	222587.30	238457.70
3. Angkutan Laut	30550.90	31969.10	34276.40
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	10371.90	10995.10	11566.50
5. Angkutan Udara	65295.40	73084.20	77493.40
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	59356.50	64413.50	69522.50
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	282823.40	298129.70	315068.60
1. Penyediaan Akomodasi	57440.80	60394.40	62997.30
2. Penyediaan Makan Minum	225382.60	237735.30	252071.30
J. Informasi dan Komunikasi	459208.10	503420.70	538762.70
K. Jasa Keuangan dan	378279.40	398971.40	415620.60

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018
Asuransi			
1. Jasa Perantara Keuangan	237896.40	246031.80	251912.30
2. Asuransi dan Dana Pensiun	79292.80	86687.90	93169.90
3. Jasa Keuangan Lainnya	52472.80	57290.80	61371.00
4. Jasa Penunjang Keuangan	8617.40	8960.90	9167.40
L. Real Estate	279500.50	289568.50	299648.20
M. Jasa Perusahaan	159321.70	172763.80	187691.10
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	319965.00	326514.30	349277.60
O. Jasa Pendidikan	293887.60	304810.80	321133.80
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102490.20	109497.50	117322.20
Q. Jasa lainnya	156507.50	170174.80	185405.60
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	9097697.90	9531259.10	10002892.80
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	336915.50	381669.00	422959.10
PRODUK DOMESTIK BRUTO	9434613.40	9912928.10	10425851.90

Tabel di atas juga memperlihatkan bagaimana prosentase setiap sektor ekonomi terhadap PDB, baik menurut harga yang berlaku maupun harga konstan. Sektor pertanian menurut harga yang berlaku memberikan kontribusi.

PRODUK DOMESTIK BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (miliar Rp.)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1671597.80	1787963.20	1900621.70
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1266865.40	1347526.20	1417316.90
a. Tanaman Pangan	425185.60	438889.50	449553.10
b. Tanaman Hortikultura	187402.60	197325.60	218713.20
c. Tanaman Perkebunan	428782.60	471466.40	489185.60
d. Peternakan	201123.50	213780.80	232274.70
e. Jasa Pertanian dan	24371.10	26063.90	27590.30

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018
Perburuan			
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	87542.40	91609.40	97396.80
3. Perikanan	317190.00	348827.60	385908.00
B. Pertambangan dan Penggalian	890868.30	1029554.60	1198987.10
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	364985.60	391449.90	460169.90
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	231697.80	323364.50	401276.90
3. Pertambangan Bijih Logam	73301.00	94322.30	111321.40
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	220883.90	220417.90	226218.90
C. Industri Pengolahan	2545203.60	2739711.90	2947450.80
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	286400.00	309372.70	332299.00
2. Industri Pengolahan Non Migas	2258803.60	2430339.20	2615151.80
3. Industri Makanan dan Minuman	740810.20	834425.10	927443.50
4. Industri Pengolahan Tembakau	117086.30	122229.60	131937.30
5. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	143545.00	150535.30	168545.20
6. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	35214.10	36988.80	41716.00
7. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	80077.60	81580.80	83710.00
8. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	89650.00	96616.20	101758.20
9. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	223404.70	236192.90	239678.00
10. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	79100.90	85869.60	92662.60
11. Industri Barang Galian bukan Logam	89056.00	89605.80	93166.90
12. Industri Logam Dasar	89559.70	98845.50	111341.30
13. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	241756.50	252870.90	257687.00

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018
14. industri Mesin dan Perlengkapan	40169.50	43093.00	47879.60
15. Industri Alat Angkutan	236558.90	246916.10	260986.80
16. Industri Furnitur	32124.20	33851.10	35487.60
17. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	20690.00	20718.50	21151.80
D. Pengadaan Listrik dan Gas	142344.40	162339.80	176640.30
1. Ketenagalistrikan	112792.30	132975.90	144437.10
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	29552.10	29363.90	32203.20
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8909.40	9438.60	10023.60
F. Konstruksi	1287600.80	1410513.60	1562297.00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1635410.40	1768865.20	1931813.00
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	334787.80	356436.00	386619.90
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1300622.60	1412429.20	1545193.10
H. Transportasi dan Pergudangan	644993.90	735229.60	797777.00
1. Angkutan Rel	7319.10	9172.00	10462.90
2. Angkutan Darat	300985.00	328306.70	354035.60
3. Angkutan Laut	39907.10	41985.80	45108.90
4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	14185.50	15077.50	16030.60
5. Angkutan Udara	177904.10	220966.60	240931.10
6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	104693.10	119721.00	131207.90
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	363055.50	387013.10	412709.70
1. Penyediaan Akomodasi	86421.40	91953.30	96571.70
2. Penyediaan Makan Minum	276634.10	295059.80	316138.00
J. Informasi dan Komunikasi	449188.70	513715.90	558938.00
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	520206.80	571203.60	616315.10
1. Jasa Perantara Keuangan	327378.20	353059.70	375503.90
2. Asuransi dan Dana Pensiun	109355.20	124126.20	137653.40

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018
3. Jasa Keuangan Lainnya	71857.20	81435.80	90037.00
4. Jasa PenunjangKeuangan	11616.20	12581.90	13120.80
L. Real Estate	350488.20	382259.20	406013.70
M. Jasa Perusahaan	211623.60	238217.00	267094.00
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	476490.90	499343.60	541685.60
O. Jasa Pendidikan	417344.80	447137.60	481747.00
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	132100.50	144830.70	158070.10
Q. Jasa lainnya	211427.90	239258.60	268574.70
NILAI TAMBAH BRUTO ATAS HARGA DASAR	11958855.50	13066595.80	14236758.40
PAJAK DIKURANG SUBSIDI ATAS PRODUK	442873.00	523229.90	601997.60
PRODUK DOMESTIK BRUTO	12401728.50	13589825.70	14838756.00

C. METODE PENGELUARAN

Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, metode pengeluaran dalam menghitung pendapatan nasional dilakukan dengan menghitung seluruh pengeluaran yang dilakukan masyarakat (konsumsi), pemerintah, dan swasta. Pemerintah dapat juga mengadakan pengeluaran berupa investasi, seperti yang dilakukan sektor swasta. Dalam perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran yang dilakukan di Indonesia, bentuk pengeluaran dapat dikelompokkan pada:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga;
2. Pengeluaran konsumsi pemerintah;
3. Pembentukan modal tetap domestik bruto;
4. Perubahan stok;
5. Ekspor barang dan jasa
6. Impor barang dan jasa setelah dikurangi ekspor.

Perhitungan pendapatan nasional Indonesia secara produksi maupun pengeluaran akan memberikan hasil yang sama. Perbedaan kedua metode perhitungan ini hanya berguna untuk mengadakan analisis sesuai kepentingan yang ada pada perekonomian

nasional Indonesia. Perhitungan pendapatan Indonesia berdasarkan pengeluaran yang dilakukan dapat dilihat pada tabel halaman berikut.

Dari segi kuantitasnya peningkatan terjadi bukan karena peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi karena naiknya harga barang dan nilai rupiah yang menurun.

**PRODUK DOMESTIK BRUTO MENURUT PENGGUNAAN
ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2020
(miliar Rp.)**

JENIS PENGELUARAN	2018	2019	2020
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	8274214.43	8965837.39	8900011.10
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	3255945.89	3529891.68	3669993.47
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	296092.19	321705.24	316444.49
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	1060517.02	1144776.68	1186897.04
d. Kesehatan dan Pendidikan	558969.26	616504.64	652934.85
e. Transportasi dan Komunikasi	1894012.58	2042268.50	1796642.85
f. Restoran dan Hotel	826225.85	903979.63	853206.73
g. Lainnya	382451.64	406711.02	423891.67
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	180893.25	206093.21	201276.29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1338638.58	1394795.29	1433686.32
a. Konsumsi Kolektif	821700.18	868273.85	862505.73
b. Konsumsi Individu	516938.40	526521.44	571180.59
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4791211.30	5121371.52	4897785.67
a. Bangunan	3566926.73	3841446.57	3719738.79
b. Mesin dan Perlengkapan	499902.52	543300.62	477346.98
c. Kendaraan	256440.49	253821.79	223576.87
d. Peralatan Lainnya	86978.22	84941.10	75728.86
e. CBR	264525.33	278745.22	283819.90
f. Produk Kekayaan Intelektual	116438.01	119116.22	117574.27
5. Perubahan Inventori	338633.58	226922.80	97857.67
6. Ekspor Barang dan Jasa	3116546.31	2920517.55	2649786.94
a. Barang	2708682.46	2500705.29	2435907.60
•Barang Non-migas	2465166.50	2325054.79	2314298.26
•Barang migas	243515.95	175650.50	121609.34
b. Jasa	407863.85	419812.25	213879.34
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3275145.30	3008573.69	2472898.89
a. Barang	2753480.50	2479523.51	2111631.71

•Barang Non-migas	2317267.91	2162656.21	1903679.96
•Barang migas	436212.59	316867.29	207951.75
b. Jasa	521664.80	529050.18	361267.18
8. Diskrepani Statistik	73763.85	5571.33	-273353.30
PRODUK DOMESTIK BRUTO	14838756.00	15832535.40	15434151.80

**PRODUK DOMESTIK BRUTO MENURUT PENGGUNAAN
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2020
(miliar Rp.)**

JENIS PENGELUARAN	2018	2019	2020
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	5651456.27	5936399.47	5780218.14
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	2072120.58	2179119.14	2190235.64
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	221470.07	230920.53	221189.33
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	760931.91	796376.16	814538.29
d. Kesehatan dan Pendidikan	391786.66	417643.65	430534.69
e. Transportasi dan Komunikasi	1407373.01	1474685.11	1333624.33
f. Restoran dan Hotel	530343.78	561967.47	516206.32
g. Lainnya	267430.25	275687.39	273889.54
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	122969.84	136026.58	130193.32
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	828876.59	855930.79	872558.31
a. Konsumsi Kolektif	508010.61	531472.45	526688.09
b. Konsumsi Individu	320865.98	324458.34	345870.22
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3444310.25	3597664.13	3419704.20
a. Bangunan	2550271.59	2687303.09	2585622.97
b. Mesin dan Perlengkapan	369427.38	387001.88	342253.06
c. Kendaraan	201829.66	193520.20	168284.52
d. Peralatan Lainnya	59995.51	58113.51	51979.17
e. CBR	180624.14	189751.10	195940.49
f. Produk Kekayaan Intelektual	82161.98	81974.36	75623.98
5. Perubahan Inventori	197369.64	129953.84	51334.13
6. Ekspor Barang dan Jasa	2286394.89	2266679.31	2092037.95
a. Barang	2038478.44	2018193.79	1964536.72
•Barang Non-migas	1805236.00	1827514.84	1785523.63
•Barang migas	233242.43	190678.95	179013.09
b. Jasa	247916.46	248485.52	127501.23

JENIS PENGELUARAN	2018	2019	2020
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2203269.94	2040354.10	1740166.33
a. Barang	1915577.84	1752000.44	1551753.62
•Barang Non-migas	1584931.21	1480737.90	1321138.05
•Barang migas	330646.63	271262.53	230615.57
b. Jasa	287692.10	288353.67	188412.71
8. Diskrepani Statistik	97744.36	66737.78	116562.98
PRODUK DOMESTIK BRUTO	10425851.90	10949037.80	10722442.70

Konsumsi Pemerintah juga ditujukan untuk anggaran pembangunan dan rutin. Anggaran pembangunan untuk menambah sarana dan prasarana. Sedangkan anggaran rutin untuk membayar administrasi pemerintahan.

D. TRANSAKSI-TRANSAKSI YANG TIDAK TERMASUK DALAM PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

Setiap kegiatan yang dapat menambah nilai dapat dikatakan sebagai suatu proses produksi, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang dapat menambah nilai tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Hal ini bukan bertentangan dengan konsep perhitungan pendapatan nasional, akan tetapi hanya alasan praktis saja. Transaksi-transaksi yang tidak termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional antara lain:

1. Perubahan nilai barang-barang sebagai akibat dari perubahan harga barang tersebut.
2. Kegiatan-kegiatan yang tidak resmi (illegal), misalnya penyeludupan barang-barang dagangan, produksi ganda dan sebagainya.
3. Pembayaran transfer yang dilakukan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain. Misalnya pembayaran subsidi, sumbangan bencana alam dan sebagainya.
4. Kegiatan – kegiatan yang seharusnya dikerjakan oleh orang lain tetapi dikerjakan sendiri. Misalnya jasa ibu rumah tangga.

E. SOAL LATIHAN

1. Jelaskan jenis-jenis perhitungan pendapatan nasional
2. Jelaskan secara singkat arus perputaran barang dalam menghitung pendapatan nasional
3. Jelaskan perbedaan pendapatan nasional dari beberapa segi

4. Apa kegunaan dari menghitung pendapatan nasional
5. Jelaskan perhitungan pendapatan nasional Indonesia

DAFTAR REFERENSI

Ace Partadiredja, Perhitungan Pendapatan Nasional, LP3ES, Jakarta, 1983

Badan Pusat Statistik, Statistik Tahun 2021

Boediono, Ekonomi Makro, BPFE, Yogyakarta, 1983

Dwi Eko, Ekonomi Makro, UMM, Malang, 2001

Soediyono, Pengantar Analisis Pendapatan Nasional, Liberty, Yogyakarta, 1994

DAFTAR PUSTAKA

- Ace Partadiredja, Perhitungan Pendapatan Nasional, LP3ES, Jakarta, 1983
- Badan Pusat Statistik, Statistik Tahun 2021
- Boediono, Ekonomi Makro, BPFE, Yogyakarta, 1983
- Djamil Suyuthi, Pengantar Ekonomi Makro, P2LPTK, Jakarta, 1990
- Dwi Eko, Ekonomi Makro, UMM, Malang, 2001
- Farid Wijaya, Ekonomika Pertumbuhan dan Internasional, BPFE, Yogyakarta, 1992
- Gregory Mankiw, Teori Makro Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 2003
- Mulya Nasution, Teori Ekonomi Makro, Djambatan, Jakarta, 1997
- Soediyono, Pengantar Analisis Pendapatan Nasional, Liberty, Yogyakarta, 1994
- Soelistyo, Teori Ekonomi Makro I, Karunika, Jakarta, 1998